# *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Difabel Panti Asuhan Bina Siwi di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

**S K R I P S I**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) Pada Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

# Oleh:

NAMA : Natasya Dwi Nurmalita NIM 20190520165

**ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2023**

**DAFTAR ISI**

[*Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Difabel Panti Asuhan Bina Siwi di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 i](#_Toc138943223)

[Oleh: i](#_Toc138943224)

[BAB PENDAHULUAN 1](#_Toc138943225)

[1.1 Latar Belakang Masalah 1](#_Toc138943226)

[Tabel 1. Jumlah Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 5](#_Toc138943227)

[Diagram 2. Jumlah Difabel se-Kabupatan Bantul Tahun 2020 9](#_Toc138943228)

[1.2 Rumusan Masalah 10](#_Toc138943229)

[1.3 Tujuan Penelitian 1](#_Toc138943230)

[1.4 Manfaat Penelitian 1](#_Toc138943231)

[1.5 Tinjauan Pusataka 2](#_Toc138943232)

[1.6 Kerangka Teori 6](#_Toc138943233)

[1.6.1 Collaborative Governance 6](#_Toc138943234)

[1.6.2.9 Governance 2](#_Toc138943235)

[1.6.3 Pemberdayaan 4](#_Toc138943236)

[1.6.4 Difabel 6](#_Toc138943237)

[1.7 Definisi Konseptual 8](#_Toc138943238)

[1.7.1 Collaborative Governance 8](#_Toc138943239)

[1.7.2 Pemberdayaan 9](#_Toc138943240)

[1.7.3 Difabel 9](#_Toc138943241)

[1.8 Definisi Operasional 9](#_Toc138943242)

[1.9 Metode Penelitian 2](#_Toc138943243)

[BAB II 6](#_Toc138943244)

[2.1 Profil Wilayah Kabupaten Bantul 6](#_Toc138943245)

[2.2 Profil Kecamatan Pajangan 10](#_Toc138943246)

[2.3 Desa Sendangsari 2](#_Toc138943247)

[2.4 Profil Panti Asuhan Bina Siwi 3](#_Toc138943248)

[BAB III PEMBAHASAN 9](#_Toc138943249)

[3.1.1 Pemerintah 9](#_Toc138943250)

[3.1.2 Akademisi 10](#_Toc138943251)

[3.1.3 Pelaku Usaha 10](#_Toc138943252)

[3.1.4 Kelompok Masyarakat 1](#_Toc138943253)

[3.2 *Collaborative Governance* dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. 2](#_Toc138943254)

[3.2.2.4.1 Pelatihan Pembuatan Produk Baru 4](#_Toc138943255)

[3.2.2.4.2 Produksi 5](#_Toc138943256)

[3.2.2.4.3 Penjualan dan Pemasaran 6](#_Toc138943257)

[3.2.4 Governance 1](#_Toc138943258)

[BAB IV KESIMPULAN 10](#_Toc138943259)

[DAFTAR PUSTAKA 3](#_Toc138943260)

[LAMPIRAN 7](#_Toc138943261)

# BAB PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

Kesetaraan adalah proses manusia untuk mendapatkan rasa adil. Mencapai sebuah kesetaraan tidak terlepas dengan permasalahan pada ketimpangan. Untuk mengurangi sebuah ketimpangan dapat dilakukan dengan melihat prinsip Hak Asasi Manusia dan dapat diatasi jika mengupayakan kesempatan di berbagai bidang dalam bentuk aksesibilias fisik maupun non- fisik (Arifin & Mahaputra, 2020:167). Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terkait dengan Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak serta (2) Semua penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil dan anak berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan khusus. Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara lanjut usia, keterbatasan fisik dan/atau mental berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk memiliki jaminan atas kehidupan yang layak, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada undang-undang yang terlepas dari segalanya terkait dengan kesetaraan sesama. Difabel atau *Differently Abled People* dan biasa dikenal dengan istilah Disabilitas, merupakan seseorang dengan kondisi fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang terbatas. Difabel dapat diartikan seseorang yang mempunyai sebuah keterbatasan secara fisik dari sejak lahir bahkan karena mengidap sebuah penyakit atau musibah kecelakaan (Feminasary Rangga, 2016:2). Kondisi ini menimbulkan banyak presepsi yang kurang baik untuk difabel hingga terjadi ketimpangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 difabel merupakan seseorang yang mempunyai limit pada fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan mempunyai sebuah kendala dalam proses berkehiduapn sehari-hari.

Undang-undang tersebut dikatakan bahwa difabel berhak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, aksesibilitas bahkan pelayanan publik (Ghifari Naufal & Atik Septi Winarsih, 2019:3). Banyak orang masih memiliki stigma maka akan menjadi sebuah hambatan dalam mengurangi ketimpangan. Stigma merupakan sebuah pikiran atau pandangan negatif yang dimiliki seseorang dan bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Kurang lebih 82% dari penyandang difabel didaerah yang masing belum maju atau ditahap berkembang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan akses di bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak (International Labour Organization, 2011:1).

Ketimpangan sosial dan ekonomi seharusnya dikurangi untuk menghilangkan diskriminasi sosial yang merebak di masyarakat. Menurut SDG nomor sepuluh, yaitu. pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara, ketimpangan menjadi tantangan besar dalam implementasi hak asasi manusia, yang sesuai dengan poin kedua perencanaan pembangunan nomor 10, yaitu. memperkuat dan mempromosikan inklusi sosial, bisnis dan politik. untuk semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, keterbatasan atau difabel, bangsa, latar belakang etnis, asal, etnis, agama dan status lainnya (Komnasham, 2017:2). Menurut World Social Science Report yang disusun oleh UNESCO yang bertemakan *Battle against Inequality* disebutkan bahwa ketimpangan memiliki tujuh dimensi, yaitu ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, ketimpangan pengetahuan dan ketimpangan lingkungan. dan ketimpangan wilayah.  (Unesco, 2016:22).

Pemerintah Indonesia telah melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas terhadap kaum difabel, tetapi masih belum menyeluruh. Pada tahun 2008 indonesia meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* atau (CRPD) yang merupakan bentuk

implementasi komitmen dan kepedulian Indonesia untuk memajukan, melindungi bahkan menjamin hak asasi manusia, terhadap penyandang difabel sehingga dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Pembahasan pada CRPD mengemukakan pentingnya pembahasan bagi para difabel secara komprehensif dan menyetarakan hak asasi dengan non- difabel secara lebih luas (Nurinayah, 2018:5). Lemahnya peraturan yang mengatur isu tentang difabel khususnya pada bidang sosial dan ekonomi maka menyebabkan banyak difabel yang kehilangan hak-hak dalam segala aspek kehidupan (Harahap Repindowaty & Bustanuddin, 2015:19). Adanya asumsi yang kurang baik terkait difabel mengakibatkan ketimpangan pada segala aspek pendidikan, maupun pekerjaan. Difabel tidak dapat hidup berkesinambungan melalui dana donasi ataupun hibah maka perlu adanya pemberdayaan dengan tujuan difabel yang mandiri. Adanya permasalahan terkait dengan ketimpangan dan tidak meratanya hak- hak untuk difabel dapat di atasi dengan sebuah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksut adalah kolaborasi bersama pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang setiap tahun sama. *collaborative governance* dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk pembuatan regulasi atau kebijakan dan manajemen publik dengan tujuan serta kepentingan dari semua stakeholder yang terlibat (FerryAfrisal dkk., 2022:1). Selain itu, *collaborative governance* juga berfungsi untuk mengantisipasi potensi kegagalan dalam proses pembangunan, perlu dilakukan tindakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama (Duadji & Tresiana, 2018:3). Kesetaraan merupakan aspek penting dalam berjalanya kolaborasi. Dalam bermusyawarah, kolaborasi merupakan bagian untuk menentukan arah

kebijakan (Andriani dkk., 2020:152).

*Collaborative Governance* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kolaborasi pemerintah Kalurahan Sendangsari dengan para *stakeholder* dalam proses pembangunan tatanan inklusif pada kaum difabel. Dalam membangun tatanan inklusif perlu dimulai dari penguatan struktur organisasi yang berada di pusat atau daerah. Salah satu provinsi yang

memiliki panti asuhan difabel adalah di Yogyakarta, dan terdapat lembaga non profit untuk difabel yaitu SIGAB dan CIKAL yang sudah membantu banyak desa di Yogyakarta dalam melakukan program pemberdayaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan titik perekonomian bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi tujuan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 60 Difabel pada tahun 2009 telah disalurkan melalui Dinas Sosial dari Yogyakarta kepada perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan jahit di daerah Kota Gede (Dewi, 2015:72-73). Di Yogyakarta terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang difabel. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Yogjakarta menyatakan bahwa tahun 2021 terdapat sebanyak 26.866 penyandang difabel di 5 kabupaten dengan perincian sebagai berikut:

# Tabel 1. Jumlah Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PPKS | | Kabupaten/Kota | | | | | Jumlah |
| Kategori | Jenis Difabel | Kulon Progo | Bantul | Gunung Kidul | Sleman | Yogyakarta |
| 1 | Mental | Psikotik | 444 | 365 | 197 | 466 | 347 | 1.819 |
| 2 | Sensorik | Netra | 390 | 491 | 706 | 459 | 146 | 2.192 |
| Runguwicara | 448 | 458 | 745 | 597 | 167 | 2.415 |
| 3 | Fisik | Eks Kronis | 187 | 139 | 325 | 189 | 145 | 985 |
| Tubuh Kaki | 1.070 | 955 | 1397 | 1.104 | 294 | 4.820 |
| Tubuh Tangan | 288 | 365 | 664 | 327 | 86 | 1.730 |
| Tubuh Bungkuk | 156 | 234 | 286 | 122 | 33 | 831 |
| Tubuh kerdil | 27 | 73 | 91 | 41 | 17 | 249 |
| 4 | Intelektual | Mental Retardasi | 1.539 | 1.837 | 2183 | 2.226 | 551 | 8.336 |
| 5 | Ganda | Ganda | 244 | 385 | 412 | 338 | 89 | 1.468 |
| 6 | Tidak Diketahui  Kecacatannya | NA | 178 | 610 | 466 | 710 | 57 | 2.021 |
|  | Jumlah |  | 4.971 | 5.912 | 7.472 | 6.579 | 1.932 | 26.866 |

Sumber: <https://dinsos.jogjaprov.go.id/>(diakses 25 September 2022, jam 21:21)

Dari tabel 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perolehan difabel yang tersebar di lima kabupaten/kota DIY dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Dalam menjaminkesetaraan pada difabel Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan sebuah regulasi Peraturan Daerah Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan pada hak-hak difabel. Peraturan tersebut mengatur terkait dengan aksesibilitas publik, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kesempatan mendapatkan permodalan usaha. Jumlah difabel tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 7.472orang. Jumlah tertinggi kedua dari Kabupaten Sleman dengan jumlah 6.579, selanjutnya dari Kabupaten Bantul yaitu 5.912 dan terakhir adalah dari Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 4.971. Maka, pemenuhan hak difabel berskala kecil seperti desa perlu juga dimasukkan dalam daftar anggaran setingkat desa untuk program pemberdayaan masyarakat termasuk juga untuk difabel. Pemberdayaan penting dilakukan sebagai sarana untuk menumbuhkan kreativitas dan skill yang akan berguna untuk keberlangsungan hidup difabel. Sehingga mampu menjangkauhal-hal yang dibutuhkan oleh difabel pada skala desa dan dapat menjadikan desa yang ramah difabel..

Kabupaten Bantul menjadi kabupaten ketiga setelah Gunung Kidul dan Sleman dengan jumlah Difabel yang sangat banyak. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang difabel. Di Kabupaten Bantul terdapat Panti Asuhan Bina Siwi khusus difabel bertempat di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Mendirikan sebuah panti asuhan khusus difabel menjadi sebuah solusi yang baik, sehingga difabel di Bina Siwi akan mendapatkan afeksi serta peningkatan kesejahteraan dari teman sejawat difabel dan para pengasuhnya. Difabel tidak selamanya akan melanjutkan kehidupan dengan donasi atau dana bantuan, seperti layaknya manusia pada umumnya difabel juga perlu melanjutkan keturunan serta mendapatkan kesejahteraan, hal ini pemberdayaan untuk difabel adalah poin utama untuk

menjadikan difabel menjadi seseorang yang mandiri. Memiliki sikap mandiri tentu menjadi tujuan semua orang juga untuk difabel, karena kemandirian harus dimiliki difabel, supaya pandangan orang lain dan rasa terabaikan tidak menjadi masalah utama difabel atas hak- haknya (Afriany & Hakim, 2018:59).

# Diagram 2. Jumlah Difabel se-Kabupatan Bantul Tahun 2020



200

178

180

165

160

148

145

145

140

126

120

117

120

100

93

79

82

80

70

71

58

60

52

46

40

20

*Sumber:* [*https://data.bantulkab.go.id/*](https://data.bantulkab.go.id/) *(diakses 26 September 2022, jam 20:26)*

Penelitian dilakukan di panti asuhan Bina Siwi dengan pertimbangan bahwa hal tersebut termasuk salah satu panti yang produktif dan memiliki banyak aktivitas dalam mengasah keterampilan seperti menjahit, menyablon dan berkesenian. Difabel di panti asuhan Bina Siwi dari berbagai karakteristik namun mereka dapat membuktikan berkat antusias pengasuh yang peduli dengan difabel sehingga dapat membentuk difabel yang memiliki keahlian. Lahirnya Panti Asuhan Bina Siwi di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul menjadi tolak ukur rasa empati masyarakat khususnya di Kalurahan Sendangsari. Panti asuhan ini dibangun dari hasil musyawarah masyarakat desa yang peduli akan beberapa warganya yang difabel. Para pengasuh difabel yang ada di Bina Siwi adalah warga Kalurahan Sendangsari. Panti Asuhan ini memberikan pemberdayaan dan pelatihan bakat serta minat yang disesuaikan dengan kondisi difabel. Para pengasuh memberikan program untuk meningkatkan keterampilan pada

difabel dengan usia produktif sehingga diharuskan untuk memberikan pelatihan guna mengoptimalisasikan dan mewujudkan difabel yang dapat berkolaborasi dalam dunia kerja. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ini pemerintah kalurahan memiliki kendala dalam regulasi dikarenakan berdirinya panti asuhan tidak terlepas dari legalitas dan menjadikan pihak Kalurahan Sendangsari tidak dapat memberikan pemberdayaan secara berkesinambungan sehingga dalam proses kolaborasi ini pihak panti asuhan yang memegang kendali dalam melakukan kolaborasi. Legalitas tersebut dapat diartikan bahwa Panti Asuhan Bina Siwi sudah berada di bawah naungan Dinas Sosial. Panti asuhan Bina Siwi harus secara mandiri melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Berkolerasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Sesuai dengan latar belakang yang telah di jabarkan oleh penulis baha penelitian ini menulis terkait ***collaborative governance* dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan analisa proses jalannya pemberdayaan pada kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi.**

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dalam upaya mengurangi diskriminasi dan ketimpangan sosial pada kelompok difabel Panti asuhan Bina Siwi di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan melakukan pemberdayaan yang berbasis *collaborative governance*. Maka, penulis tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana implementasi *collaborative governance* pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

# Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jalannya *collaborative governance* dalam proses pemberdayaan guna memberikan keterampilan untuk mewujudkan kemandirian difabel terhadap peningkatan kesempatan kerja.

# Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

* + 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini disemogakan dapat menjadi suatu acuan dalam memberikan pengetahuan pengembangan ilmu pemerintahan untuk dapat berkontribusi dalam aksi sosial secara langsung kepada masyarakat berupa pemberdayaan khususnya kepada difabel supaya lebih terbuka dengan isu difabel. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan referensi wawasan sebagai bahan kajian yang dapat diangkat menjadi topik penelitian dengan arah yang lebih luas.

* + 1. Manfaat Parktis:

Menjadi sebuah referensi hasil penelitian bagi pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga- lembaga masyarakat untuk dapat terbuka serta berupaya memberikan pemberdayaan dan pengembangan ketrampilan guna meningkatkan kemandirian pada difabel.

# Tinjauan Pusataka

Tinjauan Pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tema Penelitian** | **Nama dan Tahun Penulis** | **Link Jurnal** | **Kesimpulan** |
| 1. | *Pemberdayaan* | (Kusumo Wardani et al., 2022) | Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/17078> | Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang membawa kesejahteraan dan kekuatan sumber daya manusia khususnya penyandang disabilitas di desa Jagabaya. Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa kegiatan yaitu menjahit untuk teman difabel yang membuka jasa menjahit sendiri, pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi lingkungan TIK sebagai bagian dari pemasaran produk. |
|  |  | (Siregar & Purbantara, 2020) | Jurnal Pemberdayaan Masyarakat:  Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/041-02> | Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Panggungharjo mampu mengubah stigma dan diskriminasi yang kurang baik terhadap penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang lebih signifikan. Untuk itu kegiatan ini memiliki peran bagi penyandang disabilitas untuk memajukan Desa Panggungharjo dengan mengikuti program-program budaya. Namun, dalam proses ini masih ada beberapa orang yang berbeda pendapat karena kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dan merasa sulit untuk bekerja tanpa memperoleh kemandirian finansial. Oleh karena itu, pemerintah desa Panggungharjo harus memberikan pengaruh yang langgeng. |
|  |  | (Harmi Tjahjanti et al., 2018) | Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat  <http://journal2.um.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/3323> | Difabel di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Yayasan Insan Berkebutuhan Khusus “Al-Suaiby” bekerja sama untuk pemberdayaan dengan pembuatan jamu dan pelatihan pembuatan blogger untuk pemasaran hasil jamu. Setelah adanya pelatihan tersebut produktivitas difabel dalam pembuatan jamu segar semakin meningkat dan mendapatkan kenaikan income dari 40% menjadi 80%. Dalam melakukan kegiatan ini juga menambahkan kelompok yang peduli dengan difabel untuk ikut andil dalam berwirausaha. |
| 2. | *Collaborative governance* | (Solikhin & Rahaju, 2019) | Jurnal Ilmu Administrasi Negara  <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31135> | Proses kolaborasi pada penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: Dialog tatap muka dengan pertemuan rutin antara Pengurus Desa Karangpatihan dengan KSM Rumah Harapan dan masyarakat, serta kunjungan KPw BI Kedir ke Desa Karang Patihan; Membangun kepercayaan, dilakukan antar pemangku kepentingan melalui pertemuan intensif dan memperkenalkan transparansi; Meski berkomitmen pada proses, masih ada beberapa pengelola KSM Rumah Harapan yang belum melakukan yang terbaik untuk membantu penyandang tunagrahita; Pemahaman bersama melalui pertemuan atau dialog dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Hasil sedang dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual mahir dalam teknik budidaya ikan lele yang benar sehingga mereka dapat mengendalikan ikan lele secara mandiri. . |
|  |  | (Wirawan et al., 2022) | Jurnal Litbang  <https://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/857> | Kerjasama pemberdayaan penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik. Menurut DeSeve, hal ini terlihat dari indikator collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu belum adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, belum salimg memiliki rasa percaya yang kuat antar pemangku kepentingan, dan belum adanya pengaturan formal untuk bekerja sama memberdayakan masyarakat. Disabilitas dan kurangnya akses ke sumber daya, terutama anggaran dan infrastruktur. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah dapat membuat program dukungan disabilitas nasional dan pemerintah bekerja sama dengan UKM untuk memberdayakan penyandang disabilitas. . |
|  |  | (Arifin & Dewi, 2018) | Journal of Public Policy and Administration Research  <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/12672> | Tata kelola kolaboratif diterapkan dengan model Ansel dan Gash, sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Setiap stakeholder wajib melakukan ini. Dikarenakan setiap actor tidak memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain namun proses kolaborasi berjalan sesuai tujuan masing-masing |
|  |  | (Swastika et al., n.d.) | Jurnal Administrasi Publik <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/87996> | Kerja sama pembangunan Desa Bengkala di Kabupaten Buleleng, Bali dilakukan oleh beberapa pihak, terutama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang memberikan dukungan dana seperti pembibitan dan pemberdayaan sapi. Namun dalam hal ini kerjasama dengan pihak swasta ACT Bali dan Asosiasi Tuna Rungu Desa Bengkala dan masyarakat Desa Bengkala lebih dominan. Tidak ada kesinambungan dan pemantauan dalam proses pemberdayaan di Desa Bengkala . |
|  |  | (Ndaumanu, 2020) | Jurnal HAM  <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062> | Sebanyak 12,65% dari total jumlah penyandang disabilitas tinggal di wilayah Timor Selatan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya perlindungan dan implementasi hak penyandang disabilitas di kawasan TTS masih belum optimal. Kendala pelaksanaan upaya tersebut bersumber dari belum adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur upaya pelaksanaan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Kunjungan rumah dibatasi oleh aksesibilitas, misalnya ketika layanan ditawarkan secara langsung. Dapat dikatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, kurangnya pengumpulan informasi dan informasi, stigma dan faktor sosial budaya. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur kewajiban pemerintah kota terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. |
|  |  | (Mersi Yudi & Chatun, 2021) | Jurnal Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana  <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/download/33817/14546/> | Aksesibilitas tidak optimal karena tidak ada area umum untuk penyandang cacat. Pemerintah desa belum mengeluarkan peraturan untuk melindungi penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas dilakukan oleh kepala desa melalui pelatihan dan pendampingan produksi minyak kelapa murni, dan kepala desa mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. Keempat, jaminan sosial bagi penyandang cacat: Pemerintah desa memberikan bantuan kepada penyandang cacat berupa ternak keliling dan bantuan berupa perlengkapan khusus seperti kacamata, tongkat, kursi roda dan alat bantu dengar bagi penyandang cacat. |
|  |  | (Wastiti & Ma’ruf, 2021) | Jurnal Administrasi Negara  <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42261> | Pemerintah desa Karangpatihan cukup baik dalam penguatan berbasis indikator. Pemerintah desa mengontrak pelaksanaan pemberdayaan, dukungan dana dan peralatan, mendengarkan keluhan pengawas, dan siap mengusulkan solusi yang memungkinkan kelancaran pengalaman pemberdayaan dan memungkinkan warga difabel untuk mencari nafkah. Masalahnya adalah tidak semua produk menciptakan pengalaman berbelanja yang sama, jadi ada produk yang lebih baik dan ada yang tidak. Juga tidak ada media iklan sebagai langkah pemasaran internet, sehingga hasilnya bisa dijual sepanjang jalan. |

# Kerangka Teori

## Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash, 2009 (Sudarno, 2009:123) kolaborasi pada umunya dapat dibedakan menjadi dua arti yaitu kolaborasi yang memiliki pengertian proses atau cara dalam mengelola sesuai dengan kepentingan dan tujuan. Yang kedua adalah kolaborasi yang memiliki arti normatif yaitu memberikan sebuah aspirasi dan tujuan filosofis dengan mitra. Kolaborasi perlu dilakukan mengingat kita semua adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya sikap terbuka untuk menerima orang lain mewujudkan suatu hal yang memiliki dampak baik kedepannya. Menurut arti yang lebih luas dapat dijelaskan bahwasanya collaborative governance yakni alur yang didalamnya mengikutsertakan banyak actor sesuai dengan kepentingan masing-masing (Cordery, 2004; Hartman et al.,2002) (dalam Febrian, 2016:202). Menurut Adrian Devine et al (2011:35) *collaborative governance* menjadi hal yang penting untuk pengambilan suatu regulasi dan kesepakatan dengan mitra atau stakeholder dalam manajemen sektor publik. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebuah konsep yang melibatkan banyak aktor termasuk institusi untuk melakukan sebuah kerjasama berdasarkan ide dari masing- masing stakeholder (Fatimah et al., 2021:301). Berikut ini meliputi hal-hal yang dapat disesuaikan menurut acuan *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:550) adalah:

* + - 1. ***Starting Condition* (Kondisi Awal)**

Proses pertama pada sebuah networking menurut actor atau stakeholder, setiap actor memiliki sebuah perencanaan awal atau latar belakang yang berbeda sehingga dapat menimbulkan hubungan yang tidak simetris dalam sebuah networking yang dijalankan. Menurut Ansel dan Gash (2007) dalam (Harmawan, 2016) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal *imbalances between the resources or power of different stakeholder, the incentives between that stakeholders have to collaborate, and the past history of conflict or cooperation among stakeholders* (ketidak setaraan antara sumber-sumber atau kekuatan antar stakeholder yang berbeda, sebuah acuan untuk aktor-aktor harus berkolaborasi dan bersumber pada kolaborasi stakeholder).

* + - 1. ***Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)**

Sebuah kepemimpinan menjadikan sebuah aspek krusial pada saat melaksanakan proses kerjsama baik pemerintah dengan swasta. Kepemimpinan menjadi bagian yang utama dalam memainkan sebuah tujuan dan peran secara jelas dan menetapkan sebuah aturan dasar yang dapat membangun kepercayaan atau fasilitas dialog demi mendapatkan sebuah kesejahteraan bersama. Proses kolaborasi dapat dikatakan berhasil menggunakan konsep *Multiple Leadership.* Lasker dan Wei dalam Harmawan (2016) mengemukakan bahwasanya sebuah pemimpin diharuskan untuk memiliki ketrampilan-keterampilan yaitu, pandai mempromosikan secara luas dan tidak pasif, dapat memastikan keberpengaruhan control

* + - 1. ***Intitutional Design* (Desain Institusional)**

Ansel dan Gash (2017) menjelaskan dalam Harmawan (2016) bahwa desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar kolaborasi kritis, di mana legitimasi prosedural dari proses kolaboratif paling ditekankan. Dalam proses kolaboratif, harus ditekankan bahwa pengurus harus terbuka dan inklusif. Karena hanya sedikit kelompok yang mengetahuinya bahwa beberapa kelompok memiliki legitimasi untuk berpartisipasi. Prosesnya harus terbuka dan inklusif, karena hanya kelompok yang merasa memiliki kesempatan yang sah untuk berkontribusi dalam pengembangan keterlibatan dalam proses yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, dewan harus terbuka dan menawarkan banyak kesempatan kepada pemangku kepentingan terkait. Inti dari proses legitimasi harus didasarkan pada (1) kemampuan setiap aktor untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil kebijakan, dan (2) penegasan bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus semua aktor. Jika ada aktor yang benar-benar terlibat dalam isu yang sedang dibahas, tetapi aktor tersebut tidak memiliki kemampuan atau motif yang kuat untuk terlibat, maka pemerintah harus mengambil sikap bahwa isu tersebut disingkirkan tanpa keterlibatan aktor lain. secara partisipatif. Dalam perencanaan kelembagaan, perhatian harus diberikan pada orientasi konsensus. Dalam pertanyaan perencanaan lembaga, harus disajikan jadwal terstruktur untuk berapa lama kerjasama akan dilakukan.

* + 1. ***Collaborative Proccess* (Proses Kolaborasi)**

Model proses kolaboratif menunjukkan kerjasama sebagai fase pengembangan. Dalam Harmawan (2016), Gray mendefinisikan tiga fase cara kolaboratif, meliputi penetapan masalah, penetapan arah, dan implementasi. Dalam studi literatur yang dilakukan, kami menemukan fakta bahwa proses kolaboratif bersifat tidak teratur dan tidak linier. Kerjasama sering dilihat hanya sebagai tergantung pada pencapaian tujuan yang sesuai seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling pengertian dan hasil. Sekalipun proses kerjasama tidak teratur, komunikasi adalah inti sebuah kerja sama. Itu sebabnya kami memulai analisis dengan dialog pribadi. *.*

Komunikasi merupakan hal penting dalam Proses *collaborative governance,* Ansell dan Gash (2008) menjabarkan lima (5) proses *collaborative governance* sebagai berikut :

* + - 1. ***Face-to-face dialogue* (dialog tatap muka)**

Proses pertemuan secara langsung merupakan tahapan penting dan diperlukan dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka ini bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah dengan perbedaan stereotipe pada masing-masing aktor supaya dapat dipecahkan atau dibaurkan dalam dialog tatap muka.

* + - 1. ***Trust Building* (membangun kepercayaan)**

Penguatan dalam kepercayaan sebuah proses kolaborasi berawal dari adanya perbedaan stereotip pada masing-masing aktor kolaborasi. Percepatan membangun kepercayaan harus lebih cepat diterapkan karena akan berpengaruh dalam durasi pelaksanaan suatu proses kolaborasi. Tujuannya ialah agar dapat menerapkan strategi kolaborasi dengan cepat karena tidak membuang banyak waktu.

* + - 1. ***Commitment to The Process* (komitmen untuk proses)**

Komitmen untuk proses kolaborasi dapat ditunjukkan melalui sikap saling ketergantungan yang tinggi diantara setiap stakeholder. Komitmen dalam proses kolaborasi dapat dilakukan melalui strategi dalam pembangunan berkelanjutan agar aspek komitmen untuk proses dapat terus berjalan dengan baik.

* + - 1. ***Shared Understanding* (pemahaman bersama)**

Pemahaman bersama harus diterapkan pada setiap aktor kolaborasi dengan menumbuhkan kesepahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama.

Maka melalui keputusan secara adil dapat membentuk sebuah kesepakatan bersama.

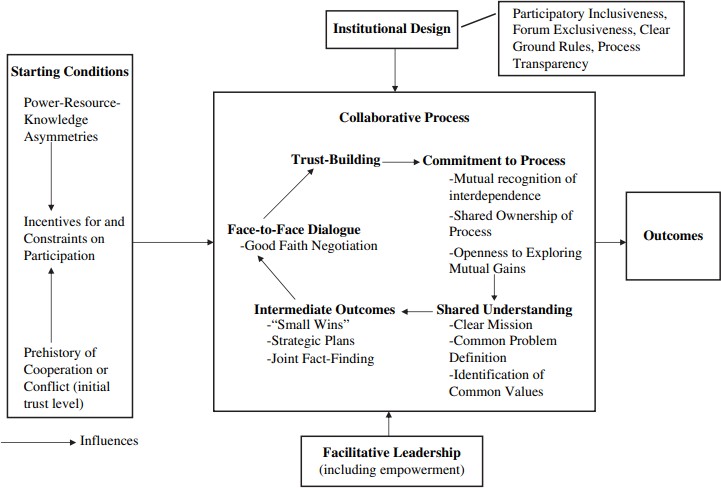
* + - 1. ***Intermediate Outcomes* (hasil jangka menengah)**

Hasil jangka menengah dalam proses kolaborasi berfungsi sebagai nilai dasar dalam keberhasilan kolaborasi. Hasil jangka menengah dapat disebut juga *small wins (*kemenangan kecil) yang kemudian dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik.

Ansell dan Gash (2008) menerapkan tiga komponen utama dalam teori *collaborative governance,* yaitu :

* + - * 1. Waktu
        2. Kepercayaan
        3. Interpedensi

Gambar 1. Model *Collaboration Governance* Ansell dan Gash



Sumber : (Ansell & Gash, 2008)

Ansell dan Gash kemudian melanjutkan bahwa terdapat strategi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni menggunakan media platform. Peran dari media platform yaitu berperan sebagai wadah pengumpulan informasi yang didapatkan dan bersifat agrerat sehingga dapat mengetahui secara lebih efektif dan efisien sebuah proses kolaborasi. Selain itu dapat memunculkan dorongan dalam menghasilkan proses atau interaksi kolaboratif (Ansell & Gash, 2018). Berdasarkan kriteria dan strategi diatas dalam keberhasilan suatu kolaborasi menurut Ansell dan Gash adalah dilaksanakan suatu kolaborasi secara sistematis, dapat diawasi oleh semua partisipasi peserta, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi. DeSeve (dalam Sudarmo 2011:110-116) terdapat beberapa item penting yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah jaringan atau kolaborasi dalam Governance yang meliputi :

* + - 1. ***Tipe Networked Strucuture* ( jenis struktur jaringan)**

Hal ini menjelaskan hubungan antara elemen dan elemen lain yang saling berhubungan dengan menggambarkan elemen fisik dari jaringan yang dipertimbangkan. Dalam hal ini, banyak struktur jaringan yang dapat digunakan, seperti hub dan face, bintang dan cluster.

* + - 1. ***Commitment to a common purpose* ( komitmen terhadap tujuan)**

Komitmen terhadap tujuan bersama disini memberikan sebuah acauan kenapa perlu dibangun. Ini karena kebutuhan akan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang positif atau yang diantisipasi. Tujuan di sini biasanya dinyatakan dalam arti keseluruhan misi organisasi dalam pemerintahan.

* + - 1. ***Trust among the participants* (adanya saling percaya)**

Kepercayaan antara stakeholder didasari pada keterkaitan professional atau secara sosial. Keyakinan bahwa peserta memercayai pengetahuan dan upaya pemangku kepentingan lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi instansi pemerintah, elemen ini sangat penting karena mereka membutuhkan keyakinan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan hukum atau peraturan dan "mempercayai" mitra mereka dalam jaringan.

## Governance

Dalam hal ini tentang bagaimana aturan kerja sama dilaksanakan, kemudiaan dijelaskan peraturan terkait pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya kebebasan untuk memutuskan bagaimana kerja sama tersebut dapat dilaksanakan.

* + - 1. ***Acees to autority* (akses terhadap kekuasaan)**

Dengan kata lain, ada aturan atau prosedur standar yang jelas dan diterima secara luas. Di sebagian besar jaringan, jaringan tersebut harus memengaruhi salah satu anggota jaringan untuk memberi mereka wewenang untuk mengimplementasikan keputusan dalam pekerjaan mereka.

* + - 1. ***Distributive accountability / Responsibility* (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas)**

Yakni, tata kelola yang berbeda (penataan, manajemen, manajemen bersama dengan pemangku kepentingan dan lainnya) dan sifat pengambilan keputusan yang berbeda untuk semua anggota jaringan, sehingga tanggung jawab yang berbeda untuk sepenuhnya mencapai hasil yang diinginkan. Jika anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan jaringan, kemungkinan besar jaringan tidak akan mencapai tujuan.

* + - 1. ***Information sharing* (berbagai informasi)**

Yaitu kemudahan yang dapat digunakan anggota, perlindungan kerahasiaan identitas dan akses terbatas untuk non-anggota, sepanjang dapat diterima oleh semua pihak. Akses kemudian dapat mencakup semua sistem, perangkat lunak, dan proses yang mendapatkan informasi dengan mudah dan aman.

* + - 1. ***Acces to resoures* (akses terhadap sumberdaya)**

Yaitu dalam ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya kerjasama, antara lain keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Menurut pemerintah Kanada tahun 2008 dalam South Arm (2011:117-120) tentang pencegahan kerjasama dan keterlibatan yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, kelembagaan dan politik.

a. budaya:

Adanya sisi budaya, bisa gagal karena ada bias budaya yang bergantung pada prosedur dan tidak berani mengambil keputusan dan mengambil resiko.

b. Institusi:

Menurut faktor kelembagaan, kerjasama ini bisa gagal karena lembaga yang terlibat dalam kerjasama atau kerjasama (terutama dengan pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarki kepada lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama.

c. Kebijakan:

Terkait faktor politik ini, kerjasama bisa gagal karena kurangnya inovasi dari pihak pemimpin untuk mencapai tujuan politik yang kompleks dan saling bertentangan. Kolaborasi dapat terhambat jika pemimpin kelompok kolaboratif kurang atau tidak inovatif.

# Pemberdayaan

Secara etimologis, “pemberdayaan” berasal dari kata “daya” yang dapat diartikan “keahlian”. Pengertian tersebut dapat diturunkan dari konsep bahwa menurut Ambari (2004), pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses pembangunan dari yang memiliki kekuatan kepada yang masih belum memiliki kekuatan. Menurut Hurerarah (2011:100) Pemberdayaan adalah upaya dan proses untuk mencapai tujuan pembangunan. Zubaedi (2009:42) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun daya melalui pembinaan, dorongan dan penyadaran akan potensi dan upaya pengembangan yang ada. Pemberdayaan dilaksanakan sebagai kegiatan untuk memperkuat eksistensi kelompok masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan (Ananda, 2019:

223). Saraswati (1997:

79-80) Pemberdayaan dapat mencakup enam hal, yaitu:

* + - 1. *Learning by doing* adalah proses pemberdayaan yang melibatkan suatutindakan danmemberikan dampak terus-menerus.
      2. *Problem Solving* artinya dalam sebuah proses pemberdayaan harus memilikipemecahan masalah dengan cara yang tepat.
      3. *Self-evaluation* dalam setiap proses pemberdayaan diharuskan ada evaluasi secara mandiriuntuk melihat sejauh mana kemampuan yang telah dicapai.
      4. *Self-selection* adanya penilaian mandiri sebagai langkah untuk melanjutkan prosespemberdayaan.
      5. *Self-development and coordination* dalam proses pemberdayaan harus dapatmemberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan pengembangan diri guna mewujudkan pemberdayaan yang tepat dan melakukan koordinasi dengan pihak lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

dalam bentuk penumbuhan iklimusaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan dapat berasal pada lebih dari satu kegiatan guna meningkatkan ketrampilan dan sadar adanya kekuatan sosial yang mampu memberi tekanan pada orang lain untuk dapat mengubah pola kekuasaan masyarakat (Aesah dkk., 2020:213). Menurut Suharto (2007:110) adapun beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah atau kurang berdaya yaitu:

1. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan keterbatasan.
2. Kelompok lemah secara psikologis,yaitu seseorang yang sulit melakukan penyesuaian diri.
3. Kelompok lemah secara finansial, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan.
4. Kelompok lemah secara struktural, seseorang yang mengalami asumsi yang tidak baik di masyarakat.

Tujuan dari sebuah proses pemberdayaan untuk memberikan kemandirian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk kehidupan yang berkelanjutan(Nopiah & Islami, 2022). Tesoriero (2008:558) menyebutkan terdapat tiga tugas dan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan, diantaranya: Dalam pemberdayaan terdapat peran untuk memfasilitasi sebagai penunjang jalanya proses pemberdayaan. Adanya beberapa faktor dalam upaya memfasilitasi, antara lain: semangatsosial; mediasi dan negosiasi; dukungan; membangun konsensus; memfasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya,;mengorganisasi; dan komunikasi pribadi. Tugas untuk mendidik artinya memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang baik sesuai dengan ilmu dan pengalamannya. Terdapat beberapa kategori peran dalam mendidik, diantaranya: peningkatan kesadaran; memberikan informasi mengenai berbagai

sumber eksternal; pelatihan; Pemberdayaan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat. Terdapat kategori peran tersebut antara lain: memperoleh berbagai sumber daya dalam membantu sebuah masyarakat untuk memperoleh berbagai sumber informasi, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan agar mampu mendirikan berbagai struktur sendiri dan menemukan tujuan sendiri; advokasi; menggunakan media; humas; jaringan kerja dan menyampaikan berbagai ide atas pengetahuan danpengalaman yang didapat.Selain tujuan juga terdapat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentunya memerlukan tahapan untuk merealisasikan dan mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain: Pemilihan lokasi dimana akan diadakannya kegiatan pemberdayaan.

# Difabel

Difabel atau biasa disebut disabilitas adalah pengertian yang dapat mendasari arti dari disabilitas, keterbatasan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan fungsi atau struktur tubuh. Keterbatasan dalam realisasi kegiatan sehari-hari. Disabilitas ini merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri-ciri tubuh manusia dengan ciri-ciri masyarakat tempat ia hidup. Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat menghambat atau menghalangi dan mengganggu fungsinya yang semestinya, yang meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik. cacat dan cacat mental. orang Orang. Teori Difabel yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Difabel yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat diakibatkan karena *impairment* (kerusakan atau kelemahan). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* dengan arti orang-orang

yang memiliki keterbatasan dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Menurut Suparlan (1984:53) mengemukakan bahwa kecacatan dikarenakan rusaknya kemampuan dalam melakukan kehidupan dan pekerjaan dan disebabkan oleh penyakit atau cacat sejak lahir. Undang-Undang tersebut juga memberikan pedoman bahwa difabel sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, *The World Health Organization (WHO),* Difabel dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Impairment*, dengan arti bahwa seseorang yang memiliki keterbatasan dalam struktur tubuhnya. Misalnya: kecelakaan, kelumpuhan, gangguan mental, tuna rungu, dan tuna wisma.
2. *Disabilit*y, keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat disebabkan oleh impairment. Dengan demikian, seseorang kurang berdaya dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dibutuhkan bantuan orang lain.
3. *Handicap*, seseorang yang mengalami kerusakan fungsi pada *impairment* dan *disability* menyebabkan ketidakmampuan dalam berinteraksi dalam peran sosial-ekonomi. Adanya stigma kasihan yang menjadi pengaruh difabel dalam faktor eksternal untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Menurut Adawiyah Robiatul (2018:119) terdapat berbagai karakteristik pada Difabel yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dan telah ditetapkan oleh tenaga medis, diantara lain:

1. Difabel Fisik, terbagi menjadi empat yaitu: (1) Tuna Netra adalah tidak berfungsinya penglihatan yang diakibatkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, sejak lahir, dan dikarenakan penyakit yang menyebabkan buta total(Mersi Yudi & Chatun, 2021:60).
   1. Tuna Daksa adalah seseorang yang mengalami kelainan pada tubuh sehingga terjadi kerusakan pada jaringan otak dan beberapa kondisi lain(Adawiyah Robiatul, 2018:119).
   2. Tuna Rungu adalah seseorang yang mengalami kerusakan pada bagian pendengaran.
   3. Tuna Wicara merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara sehingga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
2. Difabel Intelektual adalah sebuah kondisi dengan fungsi intelektual dibawah rata-rata dan kurang adanya keterampilan dalam melakukan kehidupan sehari-hari.
3. Difabel Mental dan Sosial memiliki kesulitan dalam belajar spesifik dan kesulitan dalam prestasi yang diperoleh. Namun, difabel mental memiliki dua kriteria yaitu, Pertama, mental tinggi yang artinya memiliki kemampuan intelektual tinggi dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Kedua, Mental rendah sebagaimana seseorang memiliki mental rendah yang terukur melalui IQ atau *Intelligence Quotient* dibawah 70-80(Handayani Rahayu & Widiarti, 2020:276)

Upaya pemenuhan hak difabel lima diantaranya adalah:

1. Mewujudkan penghormatan sebagai rasa toleransi dan perlindungan untuk pemenuhan hak asasi manusia serta memberikan kebebasan penuh kepada difabel untuk mendapatkan haknya.
2. Adanya jaminan dalam upaya penghormatan dan perlindungan pada difabel.
3. Mewujudkan kehidupan berkelanjutan difabel agar lebih berkualitas dan sejahtera serta mandiri secara lahir dan batin.
4. Melindungi difabel dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan Tindakan diskriminasi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Mengawasi jalanya pelaksanaan upaya penghormatan dan perlindungan difabel agar difabel dalam bereksplorasi sesuai minat dan bakat dalam membentuk kreatifitasnya sehingga dapat berperan optimal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

# Definisi Konseptual

## Collaborative Governance

*Collaborative governance* adalah sesuatu yang di dalamnya melibatkan berbagai

stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam pencapaian kesepakatan banyak pihak. C*ollaborative governance* menjadi hal yang penting untuk pengambilan suatu regulasi dan kesepakatan dengan mitra atau stakeholder dalam manajemen sektor publik. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebuah konsep yang melibatkan banyak aktor termasuk institusi untuk melakukan sebuah kerjasama berdasarkan ide dari masing- masing stakeholder.

# Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya serta proses dalam mencapai tujuan sebuah pengembangan. Selain itu sebuah usaha untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memberikan motivasi dan menumbuhkan sikap sadar akan potensi yang dimiliki serta memiliki usaha untuk mengembangkan. Pemberdayan dilakukan sebagai kegiatan untuk memperkuat keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki masalah dalam aspek kemiskinan.

# Difabel

Difabel atau biasa disebut disabilitas sebuah istilah yang mencakup disabilitas, keterbatasan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud di sini adalah keterbatasan fungsi atau struktur tubuh. Keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari  .

# Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui *collaborative governance* dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Indikator | Parameter |
| 1. | *Stakeholder Collaborative Governance* | Pemerintah | 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari 2. Dinas Sosial Kabupaten   Bantul |
| Akademisi | a. Universitas Negeri  Yogyakarta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b. SMK Nasional Bantul |
| Komunitas Masyarakat | a. Komunitas Inclue  Indonesia |
| Pelaku Usaha | a. PT Ameya |
| 2. | Tahapan *Collaborative Governance* menurut Deseve | *Networked structure* | 1. Keterkaitan antar stakeholder 2. Peran dan fungsi para   *stakeholder* |
| *Commitment to a common purpose* | 1. Partisipasi para   *stakeholder* dalam proses kolaborasi   1. Komitmen stakeholder   dalam proses kolaborasi |
| *Trust among the*  *participants* | a. Rasa saling percaya  antar *stakeholder* |
| *Governance* | 1. Regulasi atau aturan dalam pelaksanaan program kolaborasi 2. Aturan atau perjanjian   yang disepakati |
| *Acces to authority* | a. Otoritas pada masing-  masing *stakeholder* |
| *Distributive accountability/responsibility* | 1. Pertanggungjawaban dari masing-masing *stakeholder* 2. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses kolaborasi dan pemberdayaan 3. Akuntabilitas pada   setiap *stakeholder* |
| *Information Sharing* | a. Akses dan keterbukaan  informasi |
| *Acces to resources* | a. Ketersediaan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sumberdaya pada proses  pemberdayaan |

# Metode Penelitian

* + 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Yang menjadi titik pengambilan data adalah Kantor Kelurahan Sendangsari dan Yayasan Bina siwi.

* + 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui metode statistik atau kuantifikasi (identifikasi). Penelitian kualitatif lebih berusaha mengembangkan teori baru daripada menguji kebenaran teori tersebut .

* + 1. Sumber Data

Ada dua jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder .

* + - 1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat melalui kegiatan observasi terhadap lokasi penelitian, kegiatan wawancara mendalam dan beberapa dokumentasi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Ada pun data primer yangdi maksud dalam penelitian ini ialah pendapat para informan yang di anggap ada relevansi dengan tema penelitian ini antara lain mewawancarai Kepala Kalurahan Sendangsari yaitu Bapak Durori S.Pd.I, M.Pd, Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi yaitu Ibu Jumilah dan Bapak Sugiman, Pelatih Menjahit Lulusan SMK Tata Busana yaitu Kak Wanti dan Difabel yaitu fauzi.

* + - 1. Data Sekunder

Informasi secara sekunder didapatkan melalui buku-buku, surat kabar, arsip, peraturan perundang-undangan, media massa dan kajian-kajian terdahulu tentang disabilitas, pemberdayaan, dan collaborative governance. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambaran Umum Wilayah Desa Sendangsar, Kapanewon Pajanga, Kabupaten Bantul, Profil Kantor Desa Sendangsar. Profil kantor Pengaduan bertujuan untuk mengetahui gambaran dan capaian aparatur pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

* + - 1. Wawancara

Melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, guna memberikan kreatifitas untuk menunjang kemandirian pada Difabel, maka yang akan menjadi narasumber pada wawancara dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Instansi |
| 1. | Durori S.Pd.I, M.Pd | Kepala Kalurahan Sendangsari |
| 2. | Jumilah | Ketua Panti Asuhan Bina Siwi |
| 3. | Wanti | Pendamping Menjahit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Anto | Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi |
| 5. | Fauzi | Penyandang Difabel |
| 6. | Flora | Mahasiswa UNY |
| 7. | Rita | Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclue Indonesia |

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bersama narasumber yang pertama yaitu Bapak Durori S.Pd.I, M.Pd selaku Kepala Kalurahan Sendangsari yang memegang kendali penuh terkait dengan peranan kalurahandalam proses pemberdayaan kalurahan untuk Panti Asuhan Bina Siwi, selanjutnya dilakukan wawancara dengan narasumber ketua pengasuh difabel yaitu Ibu Jumilah dan Pak Anto selaku pengasuh difabel untuk mengetahui sejarah berdirinya panti asuhan, kondisi difabel dan proses pemberdayaan, ketiga akan dilakukan wawancara dengan Kak Wanti selaku guru menjahit difabel dan ketiga dilakukan wawancara bersama mahasiswa magang yaitu flora dari Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa dan Rita selaku divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclue Indonesia.

* + - 1. Observasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu subjek atau objek. Peneliti akan mengamati proses implementasi pemberdayaan dalam bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan para *stakeholder* kepada difabel di Panti Asuhan Bina Siwi dalam kurun waktu 4 bulan dari Maret hingga Juni 2023.

* + - 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat serta

menganalisis dokumen-dokumen seperti arsip, jurnal ilmiah atau dokumen penunjang data untukditeliti. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar, video serta audiodalam proses wawancara dan observasi.

* + 1. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana pemahaman kualitatif tidak selalu mencari sebab dan akibat, tetapi mencoba memahami situasi dengan menafsirkan makna yang berbeda dari masalah yang disajikan oleh situasi tersebut. Sederhananya, analisis data ini disebut debriefing. Ini bisa berarti bertentangan, mengkritik, mendukung, melengkapi atau mengomentari, dan kemudian menarik kesimpulan Anda sendiri dari hasil penelitian berdasarkan teori Anda sendiri. Peneliti memaparkan dalam bentuk cerita apa saja hasil pengolahan data yang diperoleh selama penelitian dan observasi langsung di lapangan (Yulianto, Achmad dan Mukti 2015:183)

# BAB II

**DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

# Profil Wilayah Kabupaten Bantul

* + 1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul merupakan daerah yang tidak bisa dihindari dalam sejarah Yogyakarta sebagai bagian dari kota yang menandai sejarah perjuangan. Bantul memiliki begitu banyak kisah kepahlawanan. Ceritanya antara lain perlawanan Pangeran Mangkubum di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Pertempuran Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan seorang perintis penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto: pesawat yang ditumpanginya ditembak jatuh oleh Belanda di desa Ngoto. Peristiwa penting adalah gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Sudirman (1948), yang banyak melakukan perjalanan di daerah Bantul. Daerah ini juga menjadi basis "serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dilancarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. dimulai. Acuan awal pembentukan Kabupaten Bantul adalah perjuangan Pangeran Diponegoro yang terus berlanjut melawan penjajah yang berbasis di Selarong antara tahun 1825 dan 1830. Untuk menekan Pertempuran Diponegoro, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk mengelola Vortenlanden. . Serikat. daerah yang bertugas mengelola pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawat dan Gunung Kidul, antara lain. Kesepakatan Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilaksanakan baik dalam hal pembagian wilayah dan pembayaran biaya perang, penyerahan pimpinan pemberontak, dan pembentukan wilayah administrasi. Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831, pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembagian wilayah administrasi baru di dalam Kesultanan dan tentang penetapan jabatan kepala daerah. Saat itu, Kesultanan Yogyakarta terbagi menjadi tiga kabupaten: Bantulkarang untuk wilayah selatan, Denggung untuk wilayah utara, dan Kelasa untuk wilayah timur. penganiayaan

Pembagian wilayah Kesultanan Yogyakarta yang baru pada tanggal 20 Juli 1831 atau hari Rabu Kliwon 10 Sapar tahun 1759 (Jawa) resmi berdiri Kabupaten Bantul yang dahulu bernama Bantulkarang. SriSultan Hamengkubuwono kemudian memberikan kuasa kepada seorang nayaka Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro untuk menjabat sebagai patih Bantul. Tanggal 20 Juli ini diperingati setiap tahun sebagai hari jadi Kabupaten Bantul. Selain itu, tanggal 20 Juli merupakan simbol kepahlawanan dan sakral bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan yang berpusat di sekitar Usamu Seirei Nomor 13 saat stadsgemente ordonantie dihapuskan. Kabupaten berhak mengelola anggarannya sendiri (mandiri).

* + 1. Visi Misi Kabupaten Bantul

Visi Kabupaten Bantul adalah terwujudnya masyarakat yang rukun, makmur dan berkeadilan di Kabupaten Bantul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (1945) dengan Bhinneka Tunggal Ika sesuai RPJMDVisi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara filosofis visi tersebut merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Kabupaten Bantul yang :

* + - 1. Harmonis, yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong-royong dan bertoleransi.
      2. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
      3. Berkeadilan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Misi Kabupaten Bantul menurut RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Memperkuat reformasi birokrasi menuju pengelolaan pelayanan publik yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan prima. Misi ini disengaja untuk menerapkan manajemen yang baik dengan meningkatkan kualitas layanan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu dan kompetitif yang memiliki karakteristik budaya Yogyakarta. Pemanfaatan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi dan penyediaan investasi bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Misi ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan investasi sederhana. Meningkatkan kualitas lingkungan, infrastruktur dan penanggulangan bencana. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan manajemen risiko bencana. Penanganan masalah sosial terpadu dan menjangkau Bantul sebagai kabupaten anak, perempuan, lanjut usia dan difabel. Tujuan dari misi ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang menderita masalah sosial dan untuk melindungi anak-anak dan perempuan.

* + 1. Letak Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Provinsi Daerah Yogyakarta dan berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada Sebelah Utara, Kabupaten Gunung Kidul pada Sebelah Timur dan Kabupaten Kulon Progo pada Sebelah Barat. Secara Geografis Kabupaten Bantul terletak antara 07o44’04”- 08o00’27” Lintang Selatan dan 110o12’34”- 110o31’08” Bujur Timur. Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km2. Wilayah ini merupaka 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

* + 1. Kependudukan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terbagi menjadi 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 padukuhan. Pada tahun 2020 semester II jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa dengan rincian 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak

berada di Kapanewon Banguntapan dan jumlah penduduk terkecil berada di Kapanewon Kretek. Berikut adalah Tabel 2. penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2020:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk |
| 1 | Kasihan | 104.599 |
| 2 | Sedayu | 48.156 |
| 3 | Dlingo | 39.998 |
| 4 | Pundong | 35.666 |
| 5 | Srandakan | 31.082 |
| 6 | Banguntapan | 113.298 |
| 7 | Piyungan | 52.862 |
| 8 | Sewon | 100.563 |
| 9 | Pajangan | 36.551 |
| 10 | Jetis | 58.631 |
| 11 | Pleret | 48.497 |
| 12 | Imogiri | 63.835 |
| 13 | Bambanglipuro | 41.706 |
| 14 | Pandak | 52.036 |
| 15 | Kretek | 30.764 |
| 16 | Sanden | 31.810 |
| 17 | Bantul | 64.652 |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*

# Profil Kecamatan Pajangan

* + 1. Sejarah Kecamatan Pajangan

Sejarah Pajangan di Kapanewo berdasarkan laporan warga yang mengatakan bahwa nama “Pajangan” berasal dari sebuah desa bernama Pajangan di kecamatan Triwidadi. Sejarah pembentukan Kapanewon Pajangan sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Tentang Pembentukan Daerah Administrasi yang Melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Daerah yang membentuk wilayah administratif: Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Bantul, hingga akhir tahun 2020 (1 Desember 2020), terdapat 11.702 KK, dimana 35.517 diantaranya berdomisili di Kecamatan Pajangan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kecamatan Pajangan terdiri dari 18.263 penduduk laki-laki dan 18.254 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Pajangan adalah 903 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pajangan adalah petani. Kegiatan diselenggarakan di Kapanewon Pajangan untuk memperingati wafatnya Pangeran Diponegoro. Dia adalah seorang pejuang yang pernah berperang melawan penjajah Belanda di Goa Selarong. Kegiatan ini sarat dengan pengajian dan mujahada. Diadakan setiap tahun pada tanggal 8 Januari di Pelataran Obyek Wisata Gua Selarong di Desa Guwosar Pajangan. Kegiatan ini merupakan upacara ritual yang sudah menjadi tradisi masyarakat Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan. Tujuannya adalah untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian-Nya. Kegiatan ini dimeriahkan dengan parade produksi, doa bersama dan pentas seni tradisional.

* + 1. Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Kecamatan Pajangan berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah

3.324,7590 ha. Wilayah administratif Kecamatan Pajangan meliputi 3desa yaitu:

1. Kalurahan Sendangsari, terdiri dari 18 Pedukuhan dan 91 RT
2. Kalurahan Guwosari, terdiri dari 15 Pedukuhan dan 77 RT
3. Kalurahan Triwidadi, terdiri dari 22 Pedukuhan dan 106 RT
   * 1. Kondisi Geografis

Kapanewon Pajangan Berbatasan dengan Kecamatan Kasihan dan Sedayu pada sebelah Utara, Kecamatan Bantul pada sebelah Timur, Kecamatan Pandak pada sebelah Selatan dan Sungai Progo pada sebelah Barat.

* + 1. Tugas dan Fungsi Kapanewon Pajangan

Kapanewon, berdasarkan Perbup nomor 123 Tahun 2019, bertugas mengatur urusan pemerintahan, pelayanan publik dan penguatan masyarakat desa, serta mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi perencanaan atau pengendalian urusan keistimewaan di wilayah desa Kapalanewon. tugas-tugas berikut :

* + - 1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
      2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
      3. Penyelenggaraan pelayanan publik
      4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
      5. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
      6. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
      7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
      8. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala

Daerah di wilayah Kapanewon;

* + - 1. Pengoordnasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
      2. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
      3. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukanoleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
      4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
      5. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
      6. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
      7. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
      8. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

# Desa Sendangsari

* + 1. Desa Sendangsari

Terletak di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dan secara geografis berada di Bukit Sendangsar seluas 1.176 hektar di Desa Sendangsar. Desa Sendangsari terdiri dari 18 desa dan 91 RT. Desa Sendangsari berbatasan dengan Desa Triwidadi di sebelah utara, berdampingan dengan Desa Guwosari dan Desa Bangunjiwo di sebelah timur. Desa Sendangsar berada di dekat pusat pemerintahan. Jarak Desa Sendangsari dengan ibu kota Kapanewon 3 km, jarak dari ibu kota kabupaten 15 km dan jarak dari ibu kota provinsi 20 km. Jumlah penduduk Desa Sendangsar adalah 11.450 orang dan 5.400 pria dan 6.050 wanita.

# Profil Panti Asuhan Bina Siwi

* + 1. Gambaran Umum Panti Asuhan Bina Siwi

Panti Asuhan Bina Siwi berdiri pada tanggal 27 September 1999. Pertama, fenomena sosial muncul ketika para penyandang disabilitas di sekitar Kapanewon Pajangan tidak terpelihara dengan baik dan juga adanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas cenderung memiliki masalah ekstrim yang sulit untuk dikurangi bahkan diabaikan dalam hal interaksi sosial. Oleh karena itu, para relawan mencoba memunculkan ide tentang tempat di mana penyandang disabilitas bisa mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang. sebuah proses untuk memberi mereka arah dan kekuatan. Panti Asuhan Bina Siwi dikelola secara mandiri dengan membangun di atas tanah milik kas desa dan dibangun serta dikelola oleh kelurahan setempat, sehingga Panti Asuhan Bina Siwi memiliki legalitas operasional dengan surat perintah 13/11/2012 dari Kementerian Sosial . Nomor 222/717/GL.I/ 2012.

* + 1. Sejarah Pendirian Panti Asuhan Bina Siwi

Panti Asuhan Bina Siwi merupakan panti asuhan swasta dibawah naungan LKS “Ngudiharjo” yang terletak di Komplek Balai Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Panti Asuhan didirikan pada tahun 1989, pertama di bidang pendidikan, kemudian tahun 1993 di SLB, namun masih belum mendapatkan guru pendamping, dan pada tahun 2000 bekerjasama dengan pemerintah desa. Sudah pada tahun 2009 memiliki pengurus yang berbeda dari sebelumnya, yang merawat penyandang disabilitas di sektor jasa dan bertujuan untuk mendampingi anak-anak tersebut di panti asuhan. Rata-rata penyandang disabilitas berasal dari keluarga dengan status ekonomi lemah dan berbagai permasalahan yang kompleks. Bahkan ada keluarga yang yatim piatu, keluarga yang berantakan, dan orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebagian besar anak-anak di sana mengalami keterbelakangan mental (keterampilan berpikir di bawah rata-rata), bisu atau tuli (keterampilan komunikasi terbatas) dan lumpuh (kemampuan terbatas untuk mengaktifkan gerakan motorik).

Menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat merasa khawatir karena penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan juga berhak atas kesempatan yang sama dan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mendorong para relawan untuk mendirikan Panti Asuhan Bina Siwi untuk menyediakan akomodasi, perawatan dan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari penyuluhan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas usia sekolah dikirim ke SLB pada pagi hari dan dilanjutkan dengan kegiatan keterampilan sepulang sekolah. Bagi mereka yang tidak bersekolah karena keterbatasan, fokusnya adalah pada kegiatan keterampilan.

* + 1. Alasan Pendirian Panti

Penyandang difabel banyak mengalami pembatasan terutama di kawasan Pajangan Kapanevo. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin, sehingga kesejahteraan mereka rendah. Penguatan dan pengembangan potensi anak penyandang disabilitas di wilayah Pajangan. Di panti asuhan penyandang difabel, nasehat dan penawaran secara sosial dan keagamaan lebih optimal dan berkelanjutan. .

* + 1. Visi dan Misi Panti

Visi: Mensejahterakan anak berkebutuhan khusus dan melatih kemandirian secaraterarah dan berkesinambungan.

Misi:

* + - 1. Pengoptimalan bakal dari difabel dan memberikan program untuk kemandirian difabel.
      2. Memberikan pelatihan pada difabel supaya dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar.
      3. Memberikan wadah kegiatan keterampilan untuk difabel.
      4. Memberikan wadah untuk bekerjasama antar orang tua/wali anak panti, lingkungan masyarakat,

instansi pemerintah maupun swasta dan Lembaga-lembaga lainya yang sifatnya tidak mengikat.

* + - 1. Memperdulikan kondisi kesehatan difabel dan bekerjasama dengan tenaga medis baik pemerintah maupun swasta.
      2. Memberikan semangatt untuk difabel agar patuh terhadap peraturan panti.
      3. Memberikan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh difabel.
    1. Tujuan Pendirian Panti

1. Memberikan bimbingan kepada difabel agar menjadi manusia yang memiliki iman, memiliki kepribadian baik dan memiliki sifat mulia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bergantung dengan orang lain.
2. Melatih difabel agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas.
3. Mengembangkan kemampuan dari difabel.
   * 1. Spesifikasi Klien Yang Ditangani

Difabel yang diberikan penanganan yaitu difabel dengan kondisi tunanetra, tunagrahita, tuna rungu wicara, tuna daksa, dan anak terlantar.

* + 1. Program Kerja dan Kegiatan Panti Asuhan

1. Memberikan pelayanan Pendidikan akademik (SLB)
2. Memberikan bimbingan kemandirian (Bina Diri)
3. Membimbing dalam bidang keagamaan (sholat, membaca iqro/Al-Qur’an, hafalan surat-surat pendek, dan doa sehari-hari)
4. Memberikan kemampuan yang dapat digunakan untuk melatih skill pada diri difabel (membatik, membuat sandal hotel, membuat sandal jepit, melukis, membuat keset dari kain perca, kipas bambu, boneka flannel, dan souvenir)
5. Mengajarkan kesenian untuk dapat melestarikan kebudayaan (hadroh, angklung, gamelan, campursari dan music band)
   * 1. Hambatan

Perekonomian dari mayoritas difabel di panti merupakan ekonomi menengah kebawah dengan hambatan tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang difabel.

* + 1. Upaya Mengatasi Hambatan

1. Mampu memberikan fasilitas penunjang difabel.
2. Dapat melakukan Kerjasama dengan Lembaga terkait.
3. Dapat melatih difabel sesuai bakat dan minatnya.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar terkait dengan kondisi difabel.
   * 1. Kondisi Siswa

Di Panti Asuhan Bina Siwi terdapat 40 orang cacat atau binaan yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama terdiri dari laki-laki dewasa yang tinggal di gedung 2 panti asuhan dan kelompok kedua terdiri dari perempuan yang tinggal di kelompok ini di gedung utama panti asuhan. Aada beberapa penyandang disabilitas - laki-laki yang membutuhkan perawatan khusus karena berbagai difabel.

* 1. Profil Difabel Panti Asuhan Bina Siwi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA** | **L/P** | **KELAINAN** | **TEMPAT TGL LAHIR** | **AGAMA** | **ALAMAT** |
| 1 | Welas Asih | P | Tunagrahita | Bantul,31-12-1970 | ISLAM | Benyo Sendangsari Pajangan Bantul |
| 2 | Muryanti | P | Tunagrahita | Bantul, 11-11-2000 | ISLAM | Kadibeso Argodadi Sedayu Bantul |
| 3 | Anggolo Wati | P | Tunagrahita | Bantul, 11-5-1986 | ISLAM | Jaten Sendangsari Pajangan Bantul |
| 4 | Muh. Tamziz | L | Tunagrahita | Bantul, 19-2-1986 | ISLAM | Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul |
| 5 | Jemikem | P | Tunagrahita | Bantul, 13-5-1980 | ISLAM | Beji Wetan Sendangsari Pajangan Bantul |
| 6 | Ruwanti | P | Tunagrahita | Bantul, 27-11-1998 | ISLAM | Beji Wetan Sendangsari Pajangan Bantul |
| 7 | Hasya | L | Tunagrahita | Bantul, | ISLAM | Karangjati Sendangsari Pajangan Bantul |
| 8 | Suryani | P | Tunagrahita | Yogyakarta, 3-10-1981 | ISLAM | Gondolayu Yogyakarta |
| 9 | Novi | P | Tunagrahita | Bantul, 11-07-1994 | ISLAM | Dingkikan,Rt 05,Argodadi,Sedayu |
| 10 | Riska Ayu Fadilah | P | Tunagrahita | Magelang 10-03-2005 | ISLAM | Kedung/Sembungan Wukirsari,Cangkringan,Sleman |
| 11 | Nur Endah | P | Tunagrahita | Bantul, 15-10-1990 | ISLAM | Iroyudan Guwosari Pajangan Bantul |
| 12 | Erwin Sutikna | L | Tunadaksa | Wonosobo, 5-5-1997 | ISLAM | Plombongan Selomartani Wonosobo Jateng |
| 13 | Emperatis Dini Hidayati | P | Tunagrahita | Bantul, 1-5-1996 | ISLAM | jaranan Panggungharjo Sewon Bantul |
| 14 | Epik Suprastyo | L | Tunagrahita | Bantul, 15-07-1981 | ISLAM | Kauman,rt 04,Gilangharjo,PandakBantul |
| 15 | Supriyati | P | Tunagrahita | Bantul, 27-7-1973 | ISLAM | Pranggan Palbapang Bantul |
| 16 | Nabela Rahma Fauzian | P | Tunagrahita | Bantul, 24-7-1996 | ISLAM | Karangayam, karangayam Segoroyoso |
| 17 | Fitri Ani Damayanti | P | Tunagrahita | Bantul, 23-9-1989 | ISLAM | Tambalan Kauman Gilangharjo Pandak Bantul |
| 18 | Siti Fatimah | P | Tunagrahita | Bantul, 13-2-1982 | ISLAM | Karet Pleret Bantul |
| 19 | Ahmad Ibnu Afifudin | L | Tunagrahita | Bantul, 16-6-1998 | ISLAM | Wonokromo Pleret Bantul |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Siti Hidayah | P | Tunagrahita | Bantul, 27-9-1977 | ISLAM | Gatak Jetis Bantul |
| 21 | Syarifudin | L | Tunadaksa | Bantul, 7-8-2001 | ISLAM | Bongsing Guwosari Pajangan Bantul |
| 22 | Erfan | L | Tunagrahita | Bantul, 9-11-1989 | ISLAM | Bedugan Rt 02 Pleret Bantul |
| 23 | Totok Widiyanto | L | Tunagrahita | Bantul, 11-11-1990 | ISLAM | Mangir kidul Sendangsari Pajangan Bantul |
| 24 | Prihatini | P | Tunagrahita | Jakarta, 10-11-2001 | ISLAM | Jl. Kampung Jembatan Cipinang Besar Jaktim Panjang Wetan Pekalongan Utara |
| 25 | Indah Prihwardani | P | Tunagrahita | Pekalongan, 5-7-1986 | ISLAM |
| 26 | Heri setiawan | L | Tunagrahita | Bantul, | ISLAM | Kayuhan Triwidadi Pajangan Bantul |
| 27 | Rifki Abdi Pratama | L | Tunagrahita | Jakarta, 27 - 9 - 2004 | ISLAM | Kentolan Guwosari Pajangan Bantul |
| 28 | Mudrikah Nur Latif | P | Tunagrahita | Bantul, 23-11-1996 | ISLAM | Pandes 2 Rt 2 Pleret Pleret Bantul |
| 29 | Siti Nur Khabibah | P | Tunagrahita | Bantul, 5 - 5 - 1994 | ISLAM | Dukuh Guwosari Paajaangan Bantul |
| 30 | Fica Priyanti | P | Tunagrahita | Bantul, 5-01-1990 | ISLAM | Karangasem Gilangharjo Pandak Bantul |
| 31 | Fauzan Ryan Yuniansyah | L | Tunagrahita | Bantul, 25-06-2007 | ISLAM | Glagahan Rt 002 Caturharjo Pandak Bantul |
| 32 | Hawa Zhurifa Ramadhani | P | Tunagrahita | Bantul,07-10-2007 | ISLAM | Benyo, Rt 09 Sendangsari Pajangan Bantul |
| 33 | Sarni | P | Tunagrahita | Bantul, | ISLAM | Mangir kidul Sendangsari Pajangan Bantul |
| 34 | Susiyani | P | Tunagrahita | Sleman, | ISLAM |  |
| 35 | Daffa | L | Tunagrahita | Sleman, | ISLAM |  |
| 36 | Atwa Nursyamimsih | P | Tunagrahita | Purworejo,04-07-2014 | ISLAM | Tlogoguwo,03/07,Tlogoguwo,Kaligesing,Purworejo |
| 37 | Arum Melati | P | Tunagrahita | Yogyakarta,10-05-2002 | ISLAM | Ledok Tukangan,DN.2/31,14/03,Tegal Panggung,DN,YK |

# BAB III PEMBAHASAN

* 1. ***Stakeholder Collaborative Governance* dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.**

*Stakeholder* yang ada dalam penelitian ini meliputi pemerintah, akademisi, bisnis dan masyarakat atau komunitasyarakat mas secara cerdas saling berinteraksi dengan efektif dan efisien Masing-masing aktor dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitas dan kompetensinya. Pemerintah berperan dalam merumuskan suatu kebijakan, peraturan dan dukungan finansial. Pelaku usaha dan akademisi dapat berperan untuk membantu dalam peningkatan skill atau penyedia sarana-prasarana yang dibutuhkan. Adapun selanjutnya yaitu masyarakat memiliki peran yang tidak kalah strategis, mereka tidak sekedar sebagai pengguna namun juga dapat untuk berkontribusi lebih menanggulangi permasalahan difabel yang setiap tahun sama. Uraian dibawah ini membahas peran dari setiap aktor yang ada dalam hasil analisis terhadap *collaborative governance* pada proses pemberdayaan kelompok difabel panti asuhan bina siwi, kalurahan sendangsari, kapanewon pajangan, kabupaten Bantul.

# Pemerintah

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Bina Siwi tidak didasari pada satu kekuasaan tetapi proses kolaborasi yang terbuka dan para *stakeholder* memiliki hak,tanggung jawab serta kewajiban masing- masing dalam pemenuhan proses pemberdayaan difabel dibidang sosial dan ekonomi. Proses pemberdayaan difabel di Panti Asuhan Bina Siwi dengan pemerintah Kalurahan Sendangsari adalah pemberdayaan di bidang kesenian.. Awal mula proses terbentuknya kolaborasi untuk membentuk pemberdayaan pada teman-teman difabel di Bina Siwi, proses untuk membentuk desa yang ramah difabel melalui proses musyawarah bersama warga kalurahan. Inisiasi pemberian wakaf dapat disetujui oleh pemerintah Kalurahan

Sendangsari namun dalam proses pembangunan panti pada awal mulanya mendapatkan

intervensi dari beberapa warga sekitar yang belum dapat menerima sepenuhnya keberadaan teman-teman difabel dan menjadi alasan terhambatnya keberlangsungan proses pendirian bangunan Panti Asuhan Bina Siwi. Proses selanjutnya dalam kolaborasi yang dilakukan pihak kalurahan sendangsari tidak memiliki agenda rutin proses pemberdayaan.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan Bina Siwi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan kolaborasi yang tidak menyeluruh. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini memberikan bantuan berupa fasilitas sarana-prasarana yaitu 5- unit alat mesin jahit dan bantuan dana pada tahun 2022 senilai Rp.2.000.000 untuk 20 anak difabel Bina Siwi guna melakukan proses pemberdayaan di bidang menjahit dengan output pembuatan produk jadi yaitu daster, tas, sprei, dan keset. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada setiap bulan melakukan pertemuan rutin, tidak jarang juga memberikan pelatihan hidroponik, penyuluhan kesehatan remaja bagi difabel di panti asuhan Bina Siwi.

# Akademisi

Pihak Akademisi dalam proses ini adalah pihak mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta S- 1 Pendidikan Luar Biasa yang melakukan pengabdian praktik kerja jurusan selama 3 bulan PKJ ini sifatnya wajib tempuh dengan beban 272 jam. Selain itu juga terdapat pihak siswa- siswi SMK Nasional yang ikut melakukan kegiatan magang selama 1 bulan. Kegiatan ini diterima penuh oleh pihak panti asuhan Bina Siwi, dikarenakan dari pihak mahasiswa UNY memiliki 11 program yang dapat membantu menambah kreativitas, pengetahuan dan *skill* pada difabel. Untuk siswa-siswi SMK Nasional Bantul tidak memiliki program inti, dalam kegiatan magang pihak siswa-siswi membantu para pengasuh dalam membina teman-teman difabel.

# Pelaku Usaha

PT Ameya menjadi salah satu mitra swasta bagi panti asuhan difabel Bina Siwi, dalam proses kolaborasi ini PT Ameya sebagai pemasok kain-kain sisa untuk didaur ulang menjadi produk

baru yaitu keset. Olahan keset dari kain perca aini dibuat oleh difabel dengan karakteristik *down*

*syndrome*. Dalam hal ini pihak PT Ameya tidak memiliki kesinambungan proses tersebut, tidak memiliki jadwal tertentu kapan kain sisa dari PT Amey itu akan dikirim kepada pihak panti asuhan Bina Siwi. Jika pihak PT Ameya belum memberikan kain perca maka untuk produksi keset sementara waktu terhambat bergantung pada stok kain perca.

# Kelompok Masyarakat

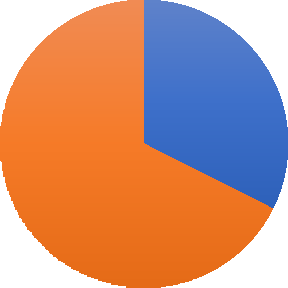
Kolaborasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adalah Inclue Indonesia sebuah komunitas sosial yang memberikan pemberdayaan bagi difabel terutama di panti asuhan Bina Siwi. Dalam proses kolaborasi ini pihak Inclue Indonesia sebagai mitra yang memberikan pelatihan, memberikan bahan atau material dan pengawasan dalam jalanya produksi serta melakukan pemasaran. Tujuan dari komunitas Inclue Indonesia untuk dapat memberikan kemandirian sehingga hasil dari pemberdayaan memiliki nilai ekonomis yang dapat membantu keberlangsungan hidup difabel. Komunitas ini juga memberikan inovasi produk supaya produk dari difabel dapat bersaing dipasaran. Pemberdayaan dilakukan oleh Inclue Indonesia selama 4 bulan dimulai dari bulan Agustus hingga November 2022.

Setiap aktor dalam proses *collaborative governance* memiliki peran yang berbeda sesuai kompetensi dan kemampuannya bidangnya masing-masing. Namun sebagai konsekuensi sistem, seluruh aktor harus berkolaborasi sebagai satu kesatuan yang solid. Dalam prosesnya masing-masing aktor memiliki kendali dan otoritas sesuai dengan tujuan masing-masing. Hal ini pihak pemerintah tidak menjadi aktor utama tetapi aktor yang lebih dominan dalam melakukan kolaborasi adalah pihak pengelola panti asuhan Bina Siwi. Masing-masing aktor berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing dengan pihak panti dan tidak ada kesepakatan satu sama lain antar aktor.

# *Collaborative Governance* dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

*Collaborative governance* merupakan sebuah cara dalam memberikan solusi dari permasalahan sosial yang belum dapat terselesaikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (Fatimah et al., 2021:295). Sesuai dengan konsep penelitian ini untuk mengetahui secara lebih detail terkait dengan *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Panti Asuhan Bina Siwi merupakan panti asuhan swasta dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat Kalurahan Sendangsari yang berada di bawah naungan Yayasan Ngudiharjo. Yayasan ini mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan berdasarkan Akta Notaris No. 003 pada tanggal 14 Desember 1999, namun Panti Asuhan ini beroperasi sejak tahun 1993 dan mengelola SLB serta layanan Orang Jompo atau Lansia.

**Bagan 1. Jumlah difabel panti asuhan Bina Siwi**



**Difabel Panti Asuhan Bina Siwi**

32%

68%

Laki-laki Perempuan

*Sumber: data panti asuhan bina siwi*

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa difabel di Bina Siwi berjumlah 37 orang dengan laki-laki berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 25 orang. Mayoritas karakteristik difabel yang ada di panti asuhan Bina Siwi yaitu Tuna Grahita karakteristik ringan, sedang, dan berat, dan tuna daksa. Kegiatan kolaborasi dilakukan diantaranya oleh pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat dan pelaku usaha dengan Panti Asuhan Bina Siwi. Namun, pihak panti asuhan Bina Siwi yang lebih mendominasi perannya dalam proses kolaborasi. Jika dilihat dengan perspektif *collaborative governance* diharapkan pemerintah kalurahan Sendangsari yang seharusnya memegang kendali atas jalannya kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dan juga ikut andil dalam proses pemberdayaan difabel. Untuk melihat sejauh mana kolaborasi yang telah dilakukan maka penulis menganalisis dengan menggunakan indikator yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dan terdapat delapan indikator yang telah dipaparkan oleh Deseve (2007) yaitu:

* + 1. **Tipe *Networked Structure* (jenis struktur jaringan)**

Prinsip *Networked Structure* harus bersifat sebaik mungkin artinya tidak boleh ada monopoli dan kekuasaan karena memiliki keefektifan serta jaringan juga tidak boleh membentuk hirarki dan ditekankan pada satu elemen kekuasaan. Seharusnya berbentuk asli dan teroganisir (Rahmawati et al., 2021:46).

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pemerintah Kalurahan Sendangsari melakukan kolaborasi dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi tidak didasari pada satu kekuasaan tetapi proses kolaborasi yang terbuka dan para *stakeholder* memiliki hak,tanggung jawab serta kewajiban masing- masing dalam pemenuhan proses pemberdayaan difabel dibidang sosial dan ekonomi. Proses terbentuknya kolaborasi untuk membentuk pemberdayaan pada teman-teman difabel di Bina Siwi. Berawal dari banyaknya difabel yang ada di Kalurahan Sendangsari maka salah satu warga bernama Ibu Jumilah menginisiasi untuk membentuk desa yang ramah

difabel melalui proses musyawarah bersama warga kalurahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Jumilah salah satu pendiri Panti Asuhan Bina Siwi bahwa:

*“Saya dulu Alumni PLB-UNY mbak, setelah lulus dari kuliah,pada tahun 1989 saya bersama bu mugiyanti dan pak sugiman kami melihat bahwa di kecamatan pajangan ini banyak anak terlantar, difabel dan anak yang tidak bersekolah. Sehingga adanya pandangan negatif maka para difabel disembunyikan dan tidak boleh bergaul dengan masyarakat sekitar. Lalu saya dan Pak Sugiman serta Bu Mugiyanti berinisiatif untuk memberikan hak pendidikan dan kehidupan yang layak bagi mereka, kami mencoba untuk mengusulkan ide kapada Kepala Kalurahan dan Alhamdulillahnya disetujui berdasarkan musyawarah. Sehingga pihak Kalurahan Sendangsari memberikan wakaf tanah dan dibangun panti ini.”* (Wawancara dengan Ibu Jumilah 3 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa empati dari Ibu Jumilah yang memberikan dampak baik hingga sekarang. Proses musyawarah untuk menentukan keputusan yang terbaik melalui banyak penolakan dari beberapa masyarakat yang sulit dalam menerima keberadaan difabel. Inisiasi pemberian wakaf dapat disetujui oleh pemerintah Kalurahan Sendangsari dan dalam prosesnya banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh ketiga pendiri panti asuhan Bina Siwi. Seperti yang dihaturkan oleh Bapak Sugiman selaku pendiri Panti Asuhan Bina Siwi bahwa:

*“Pada saat jalannya pendirian panti, beberapa warga banyak yang belum menerima keberadaan teman-teman difabel, selain itu untuk mengumpulkan difabel saya dan Bu Jum berkunjung dari rumah ke rumah, untuk menjelaskan kepada para orang tua bahwa anak berhak atas pendidikan dan hidup layak untuk dilakukan bersama dan dibawa ke panti. Kunjungan juga menjadi permintaan izin untuk membawa para difabel berkumpul bersama, belajar berbagai keterampilan untuk kesejahteraan hidup dari kunjungan tersebut kami berhasil membawa kuranng lebih 20 anak dengan rentang usia 20-40 tahun”.* (Wawancara dengan Bapak Sugiman 3 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama kali pembangunan panti asuhan menjadi titik perjuangan bagi para pendiri, untuk meyakinkan pihak orang tua tidak mudah, perlu jiwa yang besar untuk membangun pribadi anak dengan kebutuhan khusus. Seiring dengan bertambahnya tahun banyak permasalahan internal yang hadir dalam proses kelangsungan hidup di panti asuhan Bina Siwi masalah yang sering dialami oleh panti ini adalah kehabisan stok makanan, namun para pengurus panti menginisiasi dengan beriuran ataupun mengambil bahan–bahan makanan yang ada di rumah masing- masing pengasuh. Setelah keputusan final maka pihak Kalurahan Sendangsari memberikan wakaf tanah untuk dibangun panti atas musyawarah bersama dengan Surat

Keputusan Tanah LMD, BPD *No 02/KD/XI/2000.* seperti yang telah di tuturkan oleh

Bapak Durori S.Pd. I. M,Pd selaku Lurah dari Desa Sendangsari bahwa:

“*Adanya rasa simpati dari banyak pihak, dulu pihak kalurahan memberikan keputusan dari hasil musyawarah dengan niat baik untuk membantu sesama, maka kita agendakan dan kita urus dananya untuk pembangunan panti”* (Wawancara dengan Bapak Durori S.Pd. I. M,Pd pada tanggal 1 Maret 2023)

Hasil dari wawancara menyimpulkan bahwa, dalam proses kolaborasi berkelanjutan pihak kalurahan tidak memegang kendali utama dalam melaksanakan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, hanya sebagai perantara dalam bidang kesenian dengan Dinas Kebudayaan atau institusi terkait bila mana terdapat undangan untuk melakukan pentas seni. Difabel di Bina Siwi memiliki keahlian dalam bermain gamelan, angklung dan menyanyikan lagu jawa. Maka, pihak kalurahan mengundang panti asuhan Bina Siwi sebagai perwakilan atas nama desa pada acara-acara yang berkaitan dengan pementasan kesenian. Pihak Kalurahan Sendangsari merasa bahwa tidak dapat ikut ambil kendali dalam proses pemberdayaan dikarenakan panti asuhan sudah dibawah naungan Dinas Sosial. Kegiatan tersebut juga berguna untuk kelangsungan hidup teman-teman difabel karena dengan bakat tersebut mereka mendapatkan banyak undangan untuk mengikuti pentas seni di berbagai acara bahkan hingga luar kota.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini berperan memberikan fasilitas menjahit berupa mesin jahit pada tanggal 02 November 2021 berjumlah 5 unit. Dalam prosesnya pihak panti asuhan Bina Siwi membuat proposal untuk diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Fasilitas alat mesin jahit digunakan hingga sekarang oleh panti asuhan Bina Siwi untuk pembuatan produk seperti daster, gamis, kaos dan tas. Sesuai dengan yang dihaturkan oleh Bapak Anto selaku pengasuh difabel panti asuhan Bina Siwi bahwa :

*“Mesin ini kami dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul sama dari dana relawan yang datang mbak, biasanya relawan yang datang menanyakan kebutuhan panti jadi kami sesuaikan dengan kebutuhan, untuk dinas sosial kami mengajukan proposal terlebih dahulu dan langsung turun beberapa bulan kemudian”* (Wawancara dengan Bapak Anto pada 2 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fasilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul disesuaikan dengan kebutuhan dari panti asuhan. Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di bidang menjahit. Dari mesin tersebut kelompok difabel bina siwi memiliki *skill* sehingga banyak menghasilkan produk siap jual.

**Gambar 3. Proses Pemberdayaan menggunakan mesin jahit Dinas Sosial**



*Sumber: Panti Asuhan Bina Siwi*

Selain 5-unit mesin jahit yang telah diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul terbuka dengan segala kebutuhan bagi difabel panti asuhan Bina Siwi, menurut Bu Jumilah selaku ketua pengasuh panti asuhan Bina Siwi mengatakan bahwa:

*“Pihak Dinsos Bantul juga pernah memberikan bantuan berupa dana Rp.2000.000 untuk 20 orang difabel di sini. Dana tersebut kami diberikan untuk kebutuhan bagi difabel yang memiliki usia produktif. Dana tersebut lantas digunakan sesuai dengan kebutuhan difabel*”(Wawancara dengan Bu Jum 1 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak hanya memberikan bantuan asilitas mesin jahit untuk menunjang kemampuan bagi difabel tetapi bantuan berupa dana yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing difabel.

* + - 1. Akademisi

Akademisi merupakan bagian dari proses kolaborasi untuk memberikan pemberdayaan bagi kelompok difabel di panti asuhan Bina Siwi. Proses kolaborasi ini dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa dan SMK Nasional Bantul jurusan Keperawatan Sosial menjadi akademisi untuk kegiatan praktik kerja lapangan atau magang. Seperti yang dikatakan oleh Flora mahasiswa UNY jurusan PLB bahwa:

*“PKJ (Praktik Kerja Jurusan) atau magang ini adalah program dari departemen PLB. Sebenarnya program ini udah pernah ada 15 atau 20 tahun lalu, terus off dan dimulai lagi untuk angkatan 2020 (tahun ini). Jadi kemungkinan besar akan ada setiap tahun”* (Wawancara dengan Flora pada 20 Juni 2023)

Menurut Flora kegiatan praktik kerja lapangan ini terakhir diadakan sudah lima belas hingga dua puluh tahun silam. Tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia pendidikan khusus di area pendidikan/lembaga non-formal. Kegiatan praktik kerja lapangan untuk UNY dilakukan selama tiga bulan dengan rentang waktu pada 5 mei hingga 3 Juli 2023 sedangkan untuk SMK Nasional Bantul dimulai pada 20 mei hingga 20 Juni 2023. Dalam hal ini pihak panti asuhan Bina Siwi dengan senang hati menerima pihak UNY dan SMK Nasional Bantul dikarenakan dalam hal ini dapat meningkatkan kesadaran melalui pelatihan- pelatihan yang dilakukan serta mengenalkan hal baru bagi difabel.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat yang memiliki komitmen dalam proses kolaborasi sosial dan ekonomi untuk keberlangsungan hidup difabel adalah Inclue Indonesia, merupakan komunitas yang bergerak pada bidang pemberdayaan difabel pada Agustus 2022 hingga sekarang. Inclue Indonesia memiliki peran untuk memberikan pelatihan, mengawasi

jalannya produksi dan memberikan ide terkait produk baru hingga pemasaran. Hasil

penjualan atau pemasaran dilakukan dengan *fairtrade* sesuai keputusan kedua belah pihak. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rita dari Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclue Indonesia bahwa:

*“Inclue indonesia dibentuk untuk mencari difabel yang bisa dioptimalisasikan sesuai dengan karakteristik dan skillnya. Sebelum melakukan pemberdayaan di panti asuhan Bina Siwi ini kami juga harus riset dan mengetahui karakterisik dari difabel apakah bisa diberdayakan atau tidak. Tujuannya untuk memberikan kesetaraan bagi difabel dan kemandirian itu yang utama”* (Wawancara dengan Rita pada 21 Juni 2023)

Proses pelatihan dan produksi yang dilakukan oleh Inclue Indonesia yaitu pada bulan Agustus hingga November 2022. Dalam kurun waktu empat bulan Inclue Indonesia melakukan pelatihan dan produksi serta proses pendekatan tim dengan difabel di panti asuhan Bina Siwi. Tujuan dari Inclue Indonesia untuk dapat bersinergi mewujudkan negeri yang aman, nyaman dan inklusif khususnya pada difabel dan non-difabel. Inclue Indonesia mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber sebagai modal untuk melakukan kegiatan *social entrepreneuship.* Sumber dana ini didapatkan melalui kompetisi mahasiswa, dana hibah Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi, serta Proposal Insentif dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Inclue Indonesia bersinergi bersama panti asuhan Bina Siwi untuk memberikan ide bisnis dan implementasinya sehingga mendapatkan nilai ekonomis untuk menghasilkan profit. Sebelum adanya Inclue Indonesia, pihak panti asuhan Bina Siwi sudah memproduksi banyak produk seperti daster, keset dan bantal atau sprei. Tetapi pada implementasinya kurang menjual dikarenakan tidak ada inovasi produk dan pemasaranya masih *konvensional* belum menggunakan media sosial sebagai wadah pemasaran.

* + - 1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh panti asuhan Bina Siwi adalah PT Ameya. PT Ameya adalah perusahaan yang bergerak dibidang *garment*.

Berawal dari pihak panti asuhan Bina Siwi yang mengajukan proposal terkait pengajuan untuk dapat menyumbangkan sisa kain jahitan dari pabrik tersebut sehingga dapat dibuat produk daur ulang ramah lingkungan yaitu keset.

* + 1. ***Commitment to a Common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)**

Setiap kolaborasi tidak pernah terlepas dari peran masing-masing *stakeholder* untuk membentuk pola perwujudan peran sehingga dapat membentuk tatanan dari sebuah tujuan yang baik sebagai upaya untuk memberikan hasil kolaborasi yang baik. Peran yang dimiliki oleh para *stakeholder* baik peran kecil atau besar akan membuahkan hasil yang baik. Perlu adanya sebuah komitmen untuk menuju solusi terbaik. Komitmen pada sebuah proses yaitu membangun keyakinan bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk dapat mencapai sebuah regulasi bersama, sebuah prosedur harus bersifat transparan, jelas dan adil (Solikhin & Rahaju, 2019:4).

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pemerintah Kalurahan Sendangsari memiliki komitmen dalam menyukseskan kegiatan difabel di bidang kesenian dengan memberikan fasilitasn NIK atau Nomor Induk sesuai yang dihaturkan oleh Bapak Durori S.Pd.I., M,Pd selaku lurah Sendangsari bahwa:

*“Proses kolaborasi yang kami lakukan tidak menyeluruh, dikarenakan panti Asuhan sudah memilki badan hukum dibawah Dinas Sosial, selain menyediakan wakaf tanah untuk di bangun panti, kami juga menjadi perantara antar intansi maupun swasta dikarenakan di panti asuhan memiliki kesenian jadi kami sebagai penghubung. Contohnya dengan Dinas Kebudayaan tetapi bukan atas nama panti namun atas nama Desa Sendangsari terlepas yang tampil pada kesenian adalah difabel dari panti. Kami juga memfasilitasi dalam pendaftaran NIK atau Nomor Induk Kesenian dan hasildari pentas tersebut kami berikan seluruhnya pada panti.”* (Wawancara dengan Bapak Durori S.Pd.I., M,Pd pada tanggal 1 Maret 2023)

Kesenian untuk menunjang kemampuan para difabel dalam melestarikan kebudayaan yaitu Nomor Induk Kesenian atau (NIK) sebagai berikut: Paguyuban Seni Angklung “*Bambu Laras”* NIK 091/14/2021, Paguyuban Seni Hadroh *“Sholawat Nabi Sembada”* NIK 089/08/2021, Paguyuban Seni Karawitan *“Ngudi Laras”* NIK 088/04/2021,

Paguyuban Seni Musik *“Pabsi Band”* NIK 090/12/2021.

**Gambar 4. Difabel Bermain Gamelan**

*Sumber: Panti Asuhan Bina Siwi*

Dengan adanya fasilitas berupa legalitas pada kesenian tersebut dapat membantu difabel di Bina Siwi untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hingga pada tahun 2022 hingga sekarang difabel banyak mendapatkan undangan untuk tampil bermain gamelan, angklung, hadroh dan musik. Adanya komitmen yang kuat terlepas dari regulasi yang ada dan dilakukan oleh pihak Kalurahan Sendangsari untuk dapat bersinergi menjadi perantara di bidang kesenian. Hal tersebut dapat mendorong semangat bagi kelompok difabel panti asuhan Bina Siwi untuk dapat terus melestarikan budaya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anto selaku pengasuh difabel Bina Siwi bahwa:

*“Jika tidak ada undangan pentas seni baik dari kalurahan untuk perwakilan atas nama desa, biasanya kami lebih untuk menyambut tamu atau donator yang datang, biasanya kami haturkan duduk di aula untuk melihat difabel tampil bermain gamelan atau angklung”* (Wawancara dengan pak Anto pada 2 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa jika pihak Bina Siwi tidak memiliki agenda atau undangan pentas seni maka kegiatan kesenian tersebut untuk menyambut tamu atau donatur yang datang. Kegiatan di bidang kesenian ini dilakukan oleh pihak panti asuhan Bina Siwi sebagai sarana pengenalan terkait budaya dan bermain musik. Berdasarkan hal tersebut mayoritas difabel menyukai music bahkan bernyanyi hal ini menjadi bakat yang dapat disalurkan untuk kemajuan difabel. Saranaa prasarana alat- alat gamelan di dapatkan melalui donatur.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam proses kolaborasi ini tidak memiliki komitmen lebih banyak. Namun jika pihak panti asuhan Bina Siwi membutuhkan fasilitas untuk menunjang proses pemberdayaan difabel maka dapat mengajukan proposal yang akan diterima dengan terbuka oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anto selaku pengasuh panti asuhan Bina Siwi bahwa:

*“Kalau untuk komitmen mungkin lebih mereka terbuka untuk segala bentuk bantuan tetapi memang harus ada syarat-syarat yang dipenuhi seperti harus memiliki akreditasi panti juga, namun jika membutuhkan fasilitas penunjang pemberdayaan pihak Dinsos mau menerima namun turunnya beberapa bulan atau bahkan tahun.”* (Wawancara dengan pak Anto 3 Maret 2023)

Dari hasil wawancara bersama bapak anto selaku pengasuh panti asuhan Bina Siwi, bahwasanya pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak ada komitmen khusus dan terus- menerus atau berkesinambungan namun jika pihak panti asuhan membutuhkan bantuan fasilitas untuk menunjang proses pemberdayaan maka dapat diajukan melalui proposal.

* + - 1. Akademisi

Di tinjau dari sisi akademisi pihak mahasiswa UNY S-1 jurusan Pendidikan Luar Biasa memiliki komitment untuk melakukan pemberdayaan sosial melalui program-program yang telah diagendakan selama 3 bulan. Program dari mahasiswa UNY adalah identifikasi dan asesmen, perancangan program individual, pelatihan pembuatan telur asin, pelatihan K3, pelatihan *packaging*, pelatihan membuat buket, pelatihan membuat hampers, pelatihan bina diri, pengembangan *e commerce*, pengelolaan website, pembukuan penjualan, Sosialisasi dan bazar. Sedangkan program untuk pihak SMK Nasional Bantul yaitu membantu para pengasuh dalam menjaga dan merawat difabel. Seperti yang dikatakan oleh Flora mahasiswi praktik kerja jurusan dari PLB UNY:

*“Dalam waktu tiga bulan kami juga memiliki program mbak yang memang harus dilakukan dalam proses PKJ ini, program pelatihan itu kami sesuaikan dengan karakteristik difabel dan memang mengarah ke skill baru yang difabel belum pernah*

*mengetahui atau melakukan, namun dalam prosesnya kami tidak memaksakan difabel harus bisa, jika tidak hanya sebagai bahan pengenalan. Kesulitannya disini lebih kepada mengatur teman-teman difabel dikarenakan sangat aktif dan moodnya cenderung tidak bisa ditebak bahkan jika moodnya tidak baik tidak bisa diajak melakukan pelatihan dan difabel cenderung ingin tiduran dikamar .”* (Wawancara dengan Flora pada 20 Juni 2023)

Dari hasil wawancara tersebut menurut Flora penyesuaian karakteristik dengan program pelatihan yang akan dilakukan merupakan poin yang sangat penting. Pihak mahasiswa UNY berjumlah 8 orang dan dalam implementasinya melakukan program kerja dibagi berdasarkan ketentuan jadwal yang telah di tetapkan. Adanya kesulitan dalam proses praktik kerja lapangan yang dilakukan dikarenakan belum tentu difabel dapat mengikuti apa yang di arahkan dan harus dikemas se-unik mungkin supaya mood difabel tetap terjaga. Dari sisi pihak SMK Nasional Bantul dalam proses kolaborasi tidak memiliki program seperti yang dilakukan oleh mahasiswa PLB UNY, sedangkan pada implementasinya siswa-siswi SMK yang berjumlah 6 orang membantu proses pelatihan mahasiswa UNY atau membantu pengasuh panti asuhan Bina Siwi dalam melakukan kegiatan setiap harinya.

**Gambar 3.2.3.1 Pelatihan Difabel dan Mahasiswa PLB UNY**



*Sumber: Dokumentasi Mahasiswa PLB UNY*

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Ditinjau dari sisi kelompok masyarakat, Inclue Indoneia dalam melakukan kolaborasi dengan panti asuhan Bina Siwi memiliki komitmen untuk terus memberikan inovasi produk sehingga mendapatkan nilai jual. Dalam hal ini pihak Inclue Indonesia merekrut guru jahit sekaligus karyawan dari lulusan SMKN 1 Sewon Jurusan Tata Busana guna mewujudkan inklusivitas dengan mengkolaborasikan difabel dan non-difabel. Dalam pembuatan produk tersebut terpilih 6 difabel dari 40 difabel dengan karakteristik tuna grahita sedang yang sudah mahir dalam menjahit, ke enam difabel tersebut dapat menjahit dengan baik sesuai kapasitas *skill* penjahit pada umumnya walaupun perlu proses hingga berbulan-bulan. Seperti yang dikatakan oleh Rita dari Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclue Indonesia bahwa:

*“Ketika kami melakukan kunjungan pertama, kami banyak bercerita dengan ketua pengasuh, dan kami menemukan kendala dari panti asuhan Bina Siwi ini adalah pemasarannya dan pengembangan inovasi produk, keterbatasan yang dimiliki pengasuh untuk mengembangkan produk menjadi kendala, bahkan hasil produk sebagus ini masih belum banyak yang melirik dan hasil pun tidak menentu.”* (Wawancara dengan Rita pada 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah produk yang mereka buat masih sulit untuk bersaing di pasar karena tidak memiliki *competitive advantage* dan kurang memiliki nilai jual. Setelah melalui hasil evaluasi dari para pihak Inclue Indonesia dan pengasuh maka difabel di Panti Asuhan Bina Siwi mencoba untuk membuat produk baru. Proses pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bernilai sosial tetapi juga bernilai ekonomi. Pihak Inclue Indonesia melihat bawa penjualan panti Asuhan Bina Siwi dari bulan ke bulan namun sepi peminat. Dari pengalaman tersebut maka pihak panti asuhan membuat sebuah daster model baru khusus untuk ibu menyusui. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Wanti pembimbing jahit panti asuhan Bina Siwi bahwa:

*“Sebelum ada Inclue Indonesia saya memang mengajarkan membuat daster dengan*

*model yang simple karena saya belum memiliki pandangan untuk membuat daster yang seperti apa mbak, apalagi kainnya kami peroleh juga dari kain sisa garment. Proses ini juga dilakukan oleh difabel tuna grahita yang ringan dengan total 6 difabel, proses untuk difabel menjahit bagus seperti sekarang juga cukup lama perlu kesabaran dalam melatihnya.”* (Wawancara dengan Mbak Wanti pada 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh kesepakatan antara Inclue Indonesia dengan Mbak Wanti selaku pembimbing jahit panti asuhan untuk menambahkan sebuah *value* yaitu daster yang dapat mempermudah proses menyusui. Panti Asuhan Bina Siwi menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Dinas sosial Kabupaten Bantul dan para donator untuk pemberdayaan difabel melalui langkah-langkah sebagai berikut:

# Pelatihan Pembuatan Produk Baru

Proses pelatihan pertama pada 25 Agustus 2022 dilakukan oleh Tim Inclue Indonesia dan Mbak Wanti selaku pengajar jahit untuk melakukan pembuatan *sample* daster untuk ibu menyusui. Pelatihan di lakukan bersama 6 difabel dengan karakteristik Tuna Grahita kategori ringan. Proses pelatihan meliputi beberapa fase dimana teman- teman difabel diajarkan untuk membuat pola awal daster yang selanjutnya diikuti dengan percobaan pemasangan *ritsletin*g pada bagian kanan dan kiri dan diakhiri dengan menjahit hasil pemotongan pola sehingga menjadi sampel daster model baru. Berikut adalah dokumentasi pelatihan teman-teman difabel:

**Gambar 5. Pelatihan pembuatan produk baru**





*Sumber: Data Panti Auhan Bina Siwi*

Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Wanti selaku guru jahit bahwa:

*“Kami terus mengevaluasi dari hasil yang saya dan difabel buat, tapi setelah kami membuat dengan kain perca itu dan model yang biasa, kami merasa pembeli kurang memiliki minat untuk membeli, maka kami memutar otak untuk membuat inovasi produk baru yaitu produk daster untuk ibu menyusui dan berniat untuk menambah produk baru lagi seperti outer, kami membuat model untukdaster dengan memberikan ritsleting untuk akses menyusui pada bagian dada samping kanan dan kiri. Kami mencoba belajar melalui melalui youtube atau beli pola di shopee”* (Wawancara bersama Mbak Wanti pada 5 Maret 2023)

Proses pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bernilai sosial tetapi jugabernilai ekonomi. Pihak panti Asuhan Bina Siwi melihat perkembangan penjualandari bulan ke bulan namun sepi peminat. Seperti yang dikatakan oleh Mbak wanti dengan kesepakatan para pengasuh lain menambahkan sebuah *value* yaitu daster yang dapatmempermudah proses menyusui.

# Produksi

Setelah selesai dilakukan proses pelatihan pembuatan sample, maka dilakukan proses produksi setiap hari dan sebagai kegiatan utama bagi para 6 difabel di Bina Siwi. Bahan – bahan yang digunakan untuk membuat daster di pilih dari bahan tekstil rayon polos dan rayon bermotif yang dinilai menjadi bahan yang nyaman untuk digunakan. Pemilihan bahan menjadi poin utama bagi Inclue Indonesia untuk menjadi nilai tambah pada produk karena bahan tersebut memiliki keunggulan seperti daya serap keringat tinggi dan adanya sirkulasi udara yang membuat penggunanya merasa nyaman. Produksi pembuatan daster dilakukan setiap hari oleh 6 orang difabel dan 2 lulusan SMK Jurusan Tata Busana sedangkan 34 teman difabel lainnya menjahit tas, menyablon atau menganyam keset.

**Gambar 6. Proses Menjahit di Panti Asuhan Bina Siwi**



*Sumber : data Panti Asuhan Bina Siwi*

Proses produksi dilakukan bersama non difabel guna mewujudkan poin kesetaraan sosial dan inklusivitas. Proses perekrutan karyawan non difabel tidak memiliki syarat khusus hanya sesuai dengan kebutuhan dan mampu berinteraksi dengan difabel, menjadi guru serta partner dalam memproduksi hasil karya difabeltidak mudah, perlu kesabaran dan keihlasan untuk memulainya. Seperti yangdikatakan oleh Bu jum bahwa:

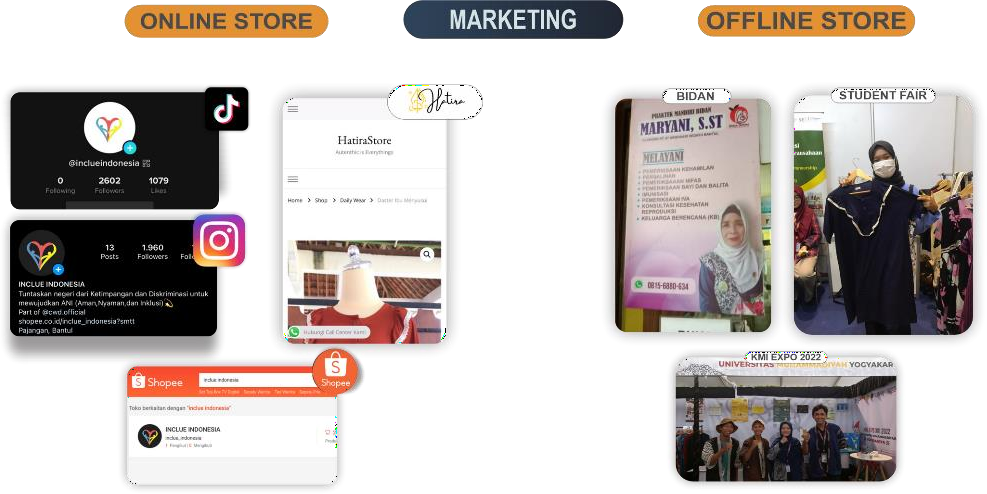
*“Kami sangat bangga jika bisa mengkolaborasikan difabel kita dengan non difabel diluar sana artinya difabel dapat terima di kalangan luar. Tidak semua orang bisa menerima keberadaan mereka. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa besar yang mampu. Saya melihat keterbatasan mood yang ada pada difabel maka saya rasa perlu untuk dilakukan kolaborasi dengan bekerja bersama non difabel. Awalnya saya merekrut satu orang tetapi saya coba lagi ternyata bisa mbak”* (Wawancara dengan Bu Jumilah 3 Maret 2023)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan sisi inklusivitas artinya membangun keberagaman dan kesetaraan tanpa membeda-bedakan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan pemberdayaan.

# Penjualan dan Pemasaran

Proses melakukan penjualan panti asuhan Bina Siwi bekerja sama dengan Inclue Indonesia sebuah platform yang bergerak pada bidang jasa dan perdagangan. Pada 20 Oktober 2022 Inclue Indonesia memberikan pengarahan Panti Asuhan Bina Siwi untuk berkolaborasi dengan lulusan SMK jurusan Tata Busana yaitu kak Wanti sebagai pemegang administrasi penjualan sosial media dan dibantu oleh Inclue Indonesia dengan memberikan bagi hasil sebanyak Rp.7000,00/pcs daster untuk profit hasil teman-teman Difabel di Panti Asuhan Bina Siwi. Target dari Inclue Indonesia sendiri lebih ke online marketing. Hal ini di karenakan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dirasa lebih efektif, mengingat juga pengguna internet sudah menyeluruh, maka dari itu tingkat keberhasilan dari pemasaran akan sesuai target. Dalam pemasarannya inclue menggunakan platform seperti aplikasi tiktok dan Instagram yang memiliki jadwal tersendiri untuk membuat konten sebanyak 1 kali dalam seminggu dalam pembuatan konten di bantu oleh Tim Inclue Indonesia. Dalam hal ini pihak

Inclue Indonesia juga bekerjasama dengan Paltform UMKM Hatira Store untuk melakukan penjualan melalui website resmi Hatira Store.



*Gambar strategi marketing yang di lakukan Inclue Indonesia baik melalui offline store maupun offline store*

Inclue Indonesia juga melakukan pemasaran melalui offline yaitu dengan bekerjasama dengan Bidan salah satunya adalah Bidan Maryani yang ada di Sedayu, Kabupaten Bantul dan mengikuti Pameran *Student Fair* pada 20 Oktober 2022 dan *KMI Expo* 2022 pada 21-25 November 2022, Pameran dan launching *The Gade Creative Lounge* di Universitas Brawijaya pada 20 Maret 2023. Dengan adanya kedua strategi pemasaran tersebut, pendapatan dari teman-teman difabel cenderung stabil namun tidak setiap bulan dapat diperkirakan pendapatanya.

* + - 1. Pelaku Usaha

Pihak PT Ameya sebagai pelaku usaha tidak memiliki komitmen lebih dalam memberikan pasokan kain untuk panti asuhan Bina Siwi . Menurut pihak panti asuhan Bina Siwi, pihak PT Ameya memberikan pasokan kain terakhir kali adalah beberapa bulan yang lalu dan sudah cukup terbilang lama. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anto selaku Pengasuh panti asuhan Bina Siwi:

*“Kalau untuk swasta kami bekerja sama dengan PT Ameya untuk memasok sisa-sisa kain perca dan digunakan membuat keset bagi difabel dengan karakteristik down syndrome, tapi sudah beberapa bulan kami tidak menanyakan terkait pasokan kain perca nya dan kami juga belum di setor mbak”* (Wawancara dengan Pak Anto 2 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hasil dari kolaborasi pihak panti asuhan Bina Siwi dengan PT Ameya tidak memiliki komitmen sehingga proses pasokan kain dari pihak garment tidak dapat ditentukan, sehingga proses pembuatan keset untuk difabel dengan karakteristik down syndrome sedikit terhambat dikarenakan kurangnya kain sisa untuk pembuatannya.

* + 1. ***Trust Among Participant* (adanya saling percaya antar *stakeholder)***

Proses adanya rasa saling percaya antar *stakeholder* menjadi poin utama dalam proses berlangsungnya kolaborasi. Rasa percaya dapat timbul sebagai bentuk tanggung jawab untuk kesepakatan dalam kelanjutan proses kolaborasi. Tanpa memiliki rasa kepercayaan akan sulit bagi *stakeholder* untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap ini dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Bina Siwi kepada para *stakeholder.*

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pihak panti asuhan memberikan kepercayaan pada pihak kalurahan dalam bidang kesenian bahwa dalam prosesnya pihak kaluahan akan membantu dan mendukung penuh serta mempromosikan kesenian yang dilakukan oleh kelompok difabel di Panti Asuhan Bina Siwi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Durori S. Pd., I., M.Pd bahwa:

*“Dalam hal ini kami bersinergi membantu atau menjadi perantara di bidang kesenian bila ada undangan atas nama desa dan hasil seluruhnya kami berikan kepada pihak Bina Siwi, kami selaku pihak kalurahan tidak mengambil bagian, dan untuk acara-acara desa kami juga sering mengajak kelompok difabel untuk ikut andil seperti contohnya kerja bakti, kenduri atau acara- acara besar dari desa mbak”* (Wawancara dengan Bapak Durori S. Pd., I., M.Pd pada 1 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya pihak kalurahan Sendangsari tidak mengambil bagian dari hasil pentas walaupun undangan tersebut atas nama desa, hal ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kalurahan Sendangsari untuk kelompok difabel di Bina Siwi dalam

melestarikan budaya daerah. Dalam acara masyarakat kalurahan Sendangsari juga menerima dengan rasa percaya keberadaan difabel sehingga ketika terdapat acara-acara desa masyarakat menyambut dengan baik. Seperti yang dituturkan oleh Fauzi difabel di PantiAsuhan Bina Siwi bahwa:

*“Sejujurnya saya sangat senang mbak ketika bersosialisasi dengan warga seperti acara kenduri, yasinan atau kerja bakti warga sangat terbuka dan saya dapat berlajar dari situ, sama sekali tidak ada rasa di kucilkan atau tidak dianggap”* (Wawancara bersama Fauzi pada tanggal 2 maret 2023)

Proses kolaborasi jika tidak didasari dengan rasa kepercayaan akan timbul banyak sengketa dan permasalahan secara internal maupun eksternal. Dalam proseskolaborasi ini kepercayaan dibangun oleh masing-masing *stakeholder* dengan pihakpanti asuhan Bina Siwi sedangkan antar *stakeholder* tidak ditemukan rasa kepercayaan tersebut dikarenakan perbedaan kepentingan namun dengan tujuan yang sama untuk memecahkan masalah untuk difabel di panti asuhan bina siwi. Dapat disimpulkan bahwa setiap *stakeholder* memiliki otoritas dengan kepentinganmasing-masing dan dalam hal ini pihak swasta kurang terlibat secara penuh dan proses perwujudan rasa percaya dikarenakan sepenuhnya dipegang oleh pihak PantiAsuhan Bina Siwi.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan panti asuhan Bina Siwi saling memberikan kepercayaan satu sama lain sebagai perwujudan proses kolaborasi. Dengan rasa percaya tersebut pihak panti percaya akan banyak dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Begitupun dengan pihak dinas sosial percaya bahwa bantuan fasilitas akan digunakan sebaik mungkin untuk jalannya proses pemberdayaan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Jumilah selaku Ketua Pengasuh Panti Asuhan Bina Siwi bahwa:

*“Memang benar kami dibawah dari Dinas Sosial namun perlu diketahui juga mba bahwa panti di Yogyakarta sangat banyak jadi dulu memang Dinas sosial menawarkan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh Bina Siwi seperti mesin jahit, dulu juga kami sempat menerima pasokan bahan makanan atau dana untuk*

*makanan namun untuk saat ini tidak lagi semenjak pandemi Covid-19 dan dialihkan untuk Panti Asuhan lainya. Untuk sekarang jika membutuhkan dana untuk fasilitas kami harus membuat proposal terlebih dahulu”* (Wawancara dengan Ibu Jumilah pada 2 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut data disimpulkan bahwasanya pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemberdayaan pada difabel dan salah satunya menjahit produk.

* + - 1. Akademisi

Dari sisi akademisi pihak panti asuhan Bina Siwi memberikan kepercayaan pada pihak mahasiswa UNY dan siswa SMK Nasional untuk dapat membantu perkembangan dan pelatihan bagi teman-teman difabel.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Dari sisi kelompok masyarakat, Inclue Indonesia dengan pihak panti asuhan Bina Siwi saling memberikan kepercayaan dengan sikap transparan dari hasil produk yang telah terjual, pemasukan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembuatan produk. Seperti yang telah dikatakan oleh Rita dari Divisi Pemberdayaan dan Produksi Inclue Indonesia bahwa:

*“Pada kurun waktu Agustus hingga November 2022 teman-teman difabel dapat membuat kurang lebih 85 produk daster ibu menyusui dan terjual kurang lebih 73 daster hingga saat ini, tetapi setiap harinya tidak dapat diperkirakan jumlahnya dikarenakan pihak difabel memiliki kegiatan lain seperti diundang pentas gamelan atau angklung dan menyambut tamu yang berkunjung ke panti. Jadi dengan keterbatasan mood tersebut kami sangat memakluminya”* (Wawancara dengan Rita 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya dan mood difabel serta kegiatan yang terkadang mendadak menjadi hambatan bagi pihak Inclue Indonesia dalam mengejar target produksi, tetapi dalam hal ini Inclue Indonesia dapat memaklumi dikarenakan konsekuensi dalam memberdayakan teman-teman difabel.

* + - 1. Pelaku Usaha

Ditinjau dari pelaku usaha PT Ameya memberikan kepercayaan kepada pihak panti asuhan Bina Siwi untuk dapat memanfaatkan hasil sisa kain jahitan dari pabrik dengan didaur ulang sebagai produk baru.

Hasilnya adalah pihak Kelurahan Sendangsari bahwa tidak ada perjanjian terikat atas proses kolaborasi di bidang kesenian, hasil sepenuhnya diberikan kepada pihak panti asuhan. Untuk pemasok kain sisa dari PT Ameya juga tidak memiliki perjanjian yang sama maka dengan hal tersebut Pihak PT Ameya juga berhak memberhentikan stok kain sisa yang ada. Pemberdayaan dilakukan dengan mandiri atas kerjasama para pengasuh panti yang memiliki tekad untuk memberikan kemandirian pada difabel. Kesimpulanya setiap *stakeholder* membantu dengan sukarela dan tidak memberikan pengawasan serta tidak adanya sanksi jika ada kendala dalam melakukan kolaborasi.

# Governance

*Governance* dapat meliputi sebuah batas-batas untuk mengetahui siapa yang dapat terlibat dengan keputusan kerja yang jelas dan sesuai kesepakatan bersama.

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pemerintah Kalurahan Sendangsari tidak memiliki *Memorandum of Understanding* terkait pemberdayaan yang dilakukan dibidang kesenian. Segala bentuk kerjasama di lakukan sebagai bentuk dukungan penuh pihak kalurahan Sendangsari dengan panti asuhan Bina Siwi.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki *Memorandum of Understanding* terkait dengan bantuan berupa 5-unit mesin jahit yang telah diberikan untuk panti asuhan Bina Siwi. Segala bentuk bantuan di lakukan sebagai bentuk dukungan penuh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan panti asuhan Bina Siwi.

* + - 1. Akademisi

Dari pihak Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Luar Biasa dan SMK Nasional Bantul memiliki *Memorandum of Understanding,* sebagai perjanjian kerjasama atas nama institusi Pendidikan yang disepakati bersama kedua belah pihak.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Pihak Inclue Indonesia memiliki *Memorandum of Understanding* pada awal kerjasama sebagai mitra untuk membantu proses pemberdayaan bagi teman-teman difabel di Bina Siwi, perjanjian kerjasama dilakukan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

* + - 1. Pelaku Usaha

Pihak PT Ameya tidak memiliki *Memorandum of Understanding* terkait dengan bantuan berupa kain sisa yang telah diberikan untuk panti asuhan Bina Siwi. Segala bentuk bantuan di lakukan sebagai bentuk dukungan penuh pihak PT Ameya dengan panti asuhan Bina Siwi.

Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa tidak adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk proses kolaborasi pada pemerintah Kalurahan Sendangsari dan PT Ameya. Sedangkan untuk UNY, SMK Nasional Bantul dan Inclue Indonesia terdapat *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak UNY dan SMK Nasional Bantul sebagai bentuk tanggung jawab selama 3 bulan proses magang.

* + 1. ***Access to Authority* (akses terhadap otoritas)**

Akses terhadap otoritas merupakan adanya ukuran-ukuran prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas.

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pihak Kalurahan Sendangsari memiliki otoritas tersendiri dalam bersinergi bersama pihak panti asuhan Bina Siwi. Hal ini sesuai dengan tugas dari kalurahan Sendangsari, namun dalam hal ini pihak kalurahan tidak dapat ikut andil lebih jauh dikarenakan panti asuhan Bina Siwi sudah

dibawah naungan Dinas Sosial. Kalurahan Sendangsari tetap membantu sebagai perantara dalam bidang kesenian.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki otoritas dan ukuran-ukuran tersendiri sesuai peran dan tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Peran ini sebagai penyedia fasilitas yang menunjang proses pemberdayaan bagi kelompok difabel di Bina Siwi. Fasilitas yang telah diberikan yaitu 5-unit mesin jahit. Seperti yang sudah dihaturkan oleh bu Jumilah bahwa:

*“Kami merasa bahwa difabel harus memiliki kegiatan yang dapat menunjang perekonomian difabeldi panti ini maka kami mencari segala cara dan mencoba berbagai kreativitas untuk mengetahui pemberdayaan dibidang apa yang cocok untuk difabel, sebelumnya kami mencoba membuat pupuk,ternak kambing, dan menanam sayur. Namun tidak ada satupun yang dapat berjalan hingga sekarang, difabel memiliki keterbatasan mood yang kadang sulit untuk kita memahami mbak”* (Wawancara dengan Ibu Jumilah pada 3 Maret 2023)

Seperti yang di katakan oleh Bu Jumilah bahwa adanya keterbatasan mood maka perlu ketlatenan dalam proses pemberdayaan. Proses ini dilakukan cukup lama hingga para pihak pengasuh berunding untuk membuat kegiatan di bidang menjahit. Dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul pihak pengelola panti merasa bersyukur dikarenakan dapat memberikan kegiatan yang cocok dengan karakter difabel tuna grahita.

* + - 1. Akademisi

Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa dari Universitas Negeri Yogyakarta dan SMK Nasional Bantul memiliki otoritas tersendiri dalam melakukan praktik kerja jurusan sebagai bentuk pemenuhan mata kuliah dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan memiliki sebelas program utama, yakni identifikasi dan asesmen, perancangan program individual, pelatihan pembuatan telur asin, pelatihan K3, pelatihan packaging, pelatihan membuat buket, pelatihan membuat hampers, pelatihan bina diri, pengembangan e commerce, pengelolaan webiste, pembukuan penjualan, sosialisasi dan bazar. Pihak pengelola panti asuhan Bina Siwi yang diwakilkan oleh Pak Anto mengatakan bahwa:

*“Adanya program dari pihak mahasiswa sebenarnya kami sangat terbuka dan senang dikarenakan dapat menambah aktivitas difabel, jika setiap harinya difabel harus menjahit maka ada suasana baru, pengenalan ilmu baru, walaupun untuk implementasinya tergantung dari difabel apakah mereka mau melanjutkan atau tidak.”* (Wawancara dengan Pak Anto 2 Maret 2023)

Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Pak Anto bahwasanya pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat menjadi sarana untuk memperbanyak ilmu bagi difabel dan dapat menjadi sarana pengenalan untuk sesuatu hal yang baru.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Inclue Indonesia dalam memberikan pemberdayaan bagi teman-teman difabel di panti asuhan Bina Siwi memiliki peran dan fungsi yaitu memberikan pendampingan atau pelatihan inovasi produk baru, memasok bahan dan material jahit serta memasarkan hasil produk dari difabel. Dalam prosesnya pihak Inclue Indonesia membagi hasil secara adil dengan pihak panti asuhan Bina Siwi.

* + - 1. Pelaku Usaha

PT Ameya memiliki otoritas sendiri dalam melakukan kolaborasi dengan pihak panti asuhan Bina Siwi yaitu memberikan sisa-sisa kain perca untuk dapat didaur ulang menjadi produk keset.

Akses terhadap otoritas merupakan adanya ukuran-ukuran prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas. Proses kolaborasi ini dari pihak pemerintah Kalurahan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, akademisi UNY dan SMK Nasional Bantul, kelompok masyarakat yaitu Inclue Indonesia dan PT Ameya memiliki otoritas sendiri dalam melakukan kolaborasi sesuai dengan tujuan dan kesepakatan masing-masing dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi.

* + 1. ***Distributive Accountability and Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responsibilitas**

Pembagian akuntabilitas dan resnponbilits ditujukan untuk melakukan sebuah forum komunikasi dan diadakan sebuah pertemuan apabila terdapat agenda atau hal-hal yang penting baik secara berkesinambungan ataupun saat-saat tertentu saja.

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pemerintah Kalurahan Sendangsari tidak memiliki agenda rutinan untuk melaksanakan pertemuan terkait dengan pemberdayaan dibidang kesenian, kegiatan komunikasi dilakukan secara individu untuk bila di butuhkan evaluasi untuk hal-hal yang terkait dengan desa.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki agenda rutin rapat satu bulan sekali untuk pemberian informasi dan monitoring serta evaluasi. Jika dibutuhkan untuk evaluasi atau pengajuan proposal terkait bantuan fasilitas penunjang sarana-prasarana maka pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau panti asuhan Bina Siwi mengajukan pertemuan.

* + - 1. Akademisi

Dari sisi akademis rapat dilakukan secara personal dengan masing-masing tim, rapat bersama pengasuh hanya ketika dibutuhkan saja. Untuk pelaksanaannya, pihak Mahasiswa UNY memulai observasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dari panti asuhan Bina Siwi dan pengenalan karakter masing-masing difabel sehingga proses pembuatan program dapat sejalan dengan kebutuhan teman-teman difabel.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Inclue Indonesia sebagai kegiatan rutin dari teman-teman difabel di Panti Asuhan Bina Siwi adalah menjahit produk daster ibu menyusui bersama 6 difabel karakteristik tuna grahita ringan.

* + - 1. Pelaku Usaha

PT Ameya tidak memiliki forum komunikasi dengan pihak panti asuhan Bina Siwi, hanya ketika dibutuhkan untuk penggunaan kain perca pihak panti asuhan Bina Siwi yang mencoba untuk menanyakan terkait pasokan kain tersebut.

Proses kolaborasi juga memerlukan proses dalam pembagian akuntabilitas dan responbilitas yang digunakan untuk melakukan sebuah forum untuk menjalin komunikasi dan diadakan sebuah agenda rutin untuk melakukan evaluasi atau mengadakan rapat dengan agenda tertentu. Hal ini dilakukan oleh internal yaitu pengasuh dan juga difabel itu sendiri namun tidak ada jadwal tertentu secara rutin. Sedangkan untuk pemerintah kalurahan Sendangsari bersifat insidental atau jika diperlukan saja untuk datang tidak memiliki jadwal tertentu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki agenda rutin rapat satu bulan sekali untuk pemberian informasi dan monitoring serta evaluasi. Dari sisi akademis rapat dilakukan secara personal dengan masing-masing tim, rapat bersama pengasuh hanya ketika dibutuhkan saja. Sedangkan untuk proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Inclue Indonesia sebagai kegiatan rutin dari teman-teman difabel di Panti Asuhan Bina Siwi adalah menjahit produk daster ibu menyusui bersama 6 difabel karakteristik tuna grahita ringan. Sedangkan rapat secara internal antara pengasuh panti diadakan secara rutin dalam waktu seminggu 2 sampai 3 kali untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kegiatan difabel.

* + 1. ***Information Sharing* (Penyampaian Informasi)**
       1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan pihak Panti Asuhan Bina Siwi masih kurang dalam menjalin komunikasi untuk penyampaian proses kolaborasi pemberdayaan difabel dengan alasan dikarenakan tidak memilikiperjanjian terikat dan tidak memiliki hasil atau catatan keuangan.

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat di pahami dengan baik namun dalam memberikan informasi pihak panti asuhan Bina Siwi memiliki perbedaan pendapat anatara satu pengasuh dengan pengasuh yang lain.

* + - 1. Akademisi

Dalam penyampaian informasi yang diberikan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan kegiatan dan program yang dilakukan selama tiga bulan.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Proses penyampaian informasi yang telah dilakukan oleh Inclue Indonesia terbuka dan transparan begitu juga dengan hasil catatan keuangan dalam bentuk cashflow dengan panti asuhan Bina Siwi, begitupun bantuan berupa barang dan material untuk digunakan sebagai bahan pokok produksi.

* + - 1. Pelaku Usaha

Tidak ada transparansi hasil informasi yang diberikan oleh PT Ameya dengan pihak panti asuhan Bina Siwi, proses kolaborasi cenderung tidak terjadwal bahkan pihak panti asuhan Bina Siwi harus menanyakan kembali terkait pasokan kain yang semula sudah di setujui.

Sistem penyampaian informasi dalam melakukan kolaborasi ini terjadi tidak menyeluruh dari para *stakeholder.* Penyampaian informasi ini belum dapat terjadi dengan baik dikarenakan baik Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan pihak Panti Asuhan Bina Siwi masih kurang dalam menjalin komunikasi untuk penyampaian proses kolaborasi pemberdayaan difabel dengan alasan dikarenakan tidak memiliki perjanjian terikat, tidak memiliki catatan keuangan yang sesuai dari hasil produk yang telah terjual, dan tidak memiliki informasi yang sesuai antar pengasuh di Bina Siwi dalam penyampaian informasi sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar pengasuh.

* + 1. ***Acces to resources* (Akses terhadap sumberdaya)**

Akses terhadap sumberdaya merupakan ketersediaan secara finansial, peralatan, dan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.

* + - 1. Pemerintah Kalurahan Sendangsari

Pihak Pemerintah Kalurahan Sendangsari dalam hal ini tidak terlihat perannya, dalam konteks ini pemerintah Kalurahan Sendangsari memberikan fasilitas berupa Nomor Induk Kesenian sebagai bentuk dukungan untuk difabel di panti asuhan Bina Siwi

* + - 1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk proses pemberdayaan yang dilakukan di bidang menjahit yaitu 5-unit mesin jahit. Begitupula secara finansial pihak Dinas Sosial memberikan bantuan dana senilai Rp.2000.000 untuk 20 orang difabel di panti asuhan Bina Siwi.

* + - 1. Akademisi

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakata memberikan sumber daya berupa pelatihan dan memiliki 11 program utama untuk pengembangan *skill* bagi difabel. Namun dalam prosesnya pihak Mahasiswa UNY merasa kesulitan dalam implementasinya dikarenakan tidak adanya dana penunjang dari kampus.

* + - 1. Kelompok Masyarakat

Inclue Indonesia sebagai mitra sekaligus yang memberikan bahan-bahan seperti kain, benang dan alat-alat menjahit untuk dibuat produk. Dari segi finansial Inclue Indonesia terbuka dan membagi hasil sesuai dengan keputusan kedua belah pihak selain itu hasil diputar kan dari pemberian dana donatur untuk keberlanjutan pemberdayaan dibidang menjahit dengan pembuatan produk. Produk yang dibuat setiap harinya hanya 1-3 produk kecuali jika mendapatkan pesanan lebih.

* + - 1. Pelaku Usaha

PT Ameya memberikan sumberdaya berupa barang yaitu kain perca untuk membantu dalam pemenuhan pemberdayaan bagi difabel *down syndrome*. Kain perca digunakan oleh difabel di panti asuhan Bina Siwi untuk didaur ulang menjadi produk baru yaitu keset.

Dalam proses kolaborasi ini secara sumberdaya dapat dikatakan cukup terlihat dari sumber daya manusia yang dapat membantu dalam proses kerja pembuatan produk difabel yaitu 2 orang lulusan SMK tata busana yang setiap harinya membimbing serta memberikan materi terkait hasil produk yang siap untuk di pasarkan. Dalam segi peralatan sangat memadai dan terdapat banyak mesin jahit dan alat sablon sebagai fasilitas penunjang. Dari segi finansial Inclue Indonesia terbuka dan membagi hasil sesuai dengan keputusan kedua belah pihak selain itu hasil diputar kan dari pemberian dana donatur untuk keberlanjutan pemberdayaan dibidang menjahit dengan pembuatan produk. Produk yang dibuat setiap harinya hanya 1-3 produk kecuali jika mendapatkan pesanan lebih, begitu juga dengan pihak PT Ameya memberikan bantuan sumber daya berupa barang yaitu sisa kain perca untuk dapat didaur ulang menjadi produk baru yaitu keset.

# BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan *collaborative governance* Kalurahan Sendangsari dengan kelompok difabel dan analisa proses pemberdayaan kelompokdifabel di Panti Asuhan Bina Siwi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Network Structure* (struktur jaringan)

pada proses kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Sendangsari dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi tidak memiliki entitas administrasi dikarenakan tidak ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara berulang-ulang namun pihak Kalurahan sebagai perantara di bidang kesenian. Namun pihak kalurahan mendukung penuh berdirinya panti asuhan dengan memberikan wakaf tanah. Sedangkan untuk pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki entitas administrasi sebegai bentuk laporan hasil penyediaan fasilitas bagi difabel dan PT Ameya tidak memiliki entitas administrasi. Para stakeholder membangun kolaborasi sesuai dengan tujuan masing-masing secara mandiritanpa ada gabungan satu sama lain dengan ini dapat dikatakan bahwastruktur jaringan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

1. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Komitmen yang dilakukan oleh pihak Kalurahan Sendangsari dalam melanjutkan pemberdayaan difabel di Panti Asuhan Bina Siwi dengan mendukung penuhdalam bidang kesenian dengan memberikan fasilitas Nomor Induk Kesenian atau NIK dan menjadi perantara dengan Dinas Kebudayaan atau instansi terkait ketika terdapat undangan pementasan. Dalam proses kolaborasi ini masing- masing dari pihak stakeholder sudah memiliki komitmen yang jelaslangsung dengan para pihak Panti Asuhan Bina Siwi.

1. *Trust among the participant* (adanya saling percaya antar stakeholder)

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh Panti Asuhan Bina Siwi memiliki rasa kepercayaan masing- masing sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Sendangsari dan PT Ameya. Namun tidak ada kepercayaan yang terikat antar stakeholder baik Dinas Sosial Kabaupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan maupun PT Ameya.

1. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola)

Kolaborasi yang dilakukan masing-masing stakeholder atau Lembaga pemerintah tidak memiliki aturan yang tercipta dikarenakan setiap stakeholder memiliki tujuan dan mengatur proses pemberdayaan sendiri. Dapat disimpulkan belum ada perwujudan pemberdayaan di nilai dari sudut pandang tata kelola yang jelas.

1. *Acces to authoritv* (akses terhadap kekuasaan)

Proses kolaborasi pada setiap stakeholder sudah memiliki otoritas yang jelas. Masing - masing stakeholder baik dari pihak pemerintah Kalurahan Sendangsari, Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta pihak swasta PT Ameya memiliki otoritas sendiri dalam melakukan kolaborasi sesuai dengan tujuan dan kesepakatan masing-masing dengan pihak Panti Asuhan Bina Siwi sehingga memiliki peran sendiri.

1. *Describtive accountability/responbility*

Dalam melakukan kolaborasi pada setiap stakeholder memiliki pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak ada keterkaitan antar stakeholder dalam melakukan pemberdayaan. Komunikasi sebagai bentuk tanggung jawabantar stakeholder dengan dibentuk forum untuk menjalin komunikasi diadakan dengan jadwal tertentu. Dinas Sosial memberikan sarana wadah komunikasi dengan diadakan pertemuan antar Panti Asuhan di Kabupaten Bantul selama 1 bulan sekali namun untuk PT Ameya dan Pemerintah Kalurahan Sendangsari tidak memiliki jadwal tertentu namun diadakan jikadibutuhkan. Sedangkan rapat secara internal antara pengasuh panti

diadakansecara rutin dalam waktu seminggu 2 sampai 3 kali untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kegiatan difabel.

1. *Information Sharing* (penyampaian informasi)

Penyampaian informasi ini belum dapat terjadi dengan baik dikarenakan baik Pemerintah Desa Sendangsari atau pihak Panti Asuhan Bina Siwi masih kurang dalam menjalin komunikasi untuk penyampaian proses kolaborasi pemberdayaan difabel dengan alasan dikarenakan tidak memiliki perjanjian terikat, tidak memiliki catatan keuangan yang sesuai dari hasil pada setiap pementasan kesenian, hasil produk yang telah terjual, dan tidak memiliki informasi yangsesuai antar pengasuh di Bina Siwi dalam penyampaian informasi sehinggasering terjadi kesalahpahaman antar pengasuh.

1. *Access to resources* (akses sumber daya)

Dalam proses kolaborasi ini secarasumberdaya dapat dikatakan cukup terlihat dari sumber daya manusia yangdapat membantu dalam proses kerja pembuatan produk difabel yaitu 2 oranglulusan SMK tata busana yang setiap harinya membimbing serta memberikan materi terkait hasil produk yang siap untuk di pasarkan. Dalamsegi peralatan banyak para donatur dan pihak Dinas Sosial abupatenBantul yang membantu memberikan mesin jahit.

Ditinjau dari delapan indikator diatas peran pemerintah masih pasif dan cenderung tidak ada, proses kolaborasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak panti asuhan Bina Siwi yang bekerjasama dengan stakeholder. Seharusnya pemerintah yang mendominasi dan menjalankan proses kolaborasi dengan para stakeholder untuk bersinergi mewujudkan inklusivitas. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kolaborasi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tercapai

# DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soejono. (1990) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Sarundajang, (2000). Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Sudarmo. 2011. Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media.

Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan StrategiPembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Suharto,E. (2007). Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab SosialPerusahaan, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 183.

Zubaedi. (2009). Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Ar Ruzz Media.

Tesoriero, Jim & Ife Frank. (2008). Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suparlan, P. (1984). Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan untuk Antropologi Perkotaan. Jakarta:Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.

Devine, Adrian, Emily boyle dan Stephen Boyd. (2011). International Jurnal of Public SectorManagement Vol. 24 No. 1, hal.23-41.

Aesah, S., Harsono, Y., & Jaswita, D. I. (2020). PEMBERDAYAAN DIFABEL MELALUI USAHA EKONOMIPRODUKTIF (UEP) DI DESA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT. 14(2).

Affandy, Y. (2021). PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN

PENYANDANG DISABILITAS. Jurnal Mentari Publika.

Afriany, J., & Hakim, A. (2018). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus PadaHimpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli Serdang). <http://seminar-id.com/semnas->sensasi2018.htmlPage|57

Ananda, S. (2019). PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PELATIHAN PEMBUATANBONEKA BANTAL UNTUK ANAK DOWN SYNDROME DI DESA PANCIRO. 218–240.

Andriani, R., Ode, L., Islamy, S., & Kesehatan, F. (2020). DESAIN KELEMBAGAAN DALAM KOLABORASI

PENCEGAHAN KEMATIAN IBU SAAT PERSALINAN. Jurnal Kesehatan

Masyarakat, 6(2). https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2

Arifin, M., & Mahaputra, W. (2020). INOVASI LIMBAH JAHE MENJADI HAND SANITAZER OLEH KELOMPOK SAHABAT DIFABEL JEPARA DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI PROGRAM CSR

PT PLN UNIT INDUK TANJUNG JATI B.

[http://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id](http://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/)

Dewi, U. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK

MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA. Dalam Jurnal

Kajian Ilmu Administrasi Negara (Vol. 67). https://kemsos.go.id/2015

Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 13(1), 1.

https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201

Ershanty, D., Utoyo S, B., & Ma’arif, S. (2020). KEMITRAAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL AMANAH BUNDA DALAM REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS. Dalam License AdministrativA | (Vol. 2). Feminasary Rangga, D. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2016.

[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/7505/Naskah%20Jurn](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/7505/Naskah%20Jurnal%20Publika) [al%20Publika](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/7505/Naskah%20Jurnal%20Publika) si%20Skripsi.Pdf?Sequence=11&isAllowed=y, 1–17.

Ferry Afrisal, A., Thahir Haning, M., Akmal Ibrahim, M., & Yunus, M. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

(Vol. 11, Issue 5).

Ghifari Naufal, & Atik Septi Winarsih, D. (2019). KUALITAS PELAYANAN SIM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES BANTUL TAHUN 2018- 2019.

[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/35589/Jurnal%20nauf](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/35589/Jurnal%20naufal.Pdf?Seque) [al.Pdf?Seque](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/35589/Jurnal%20naufal.Pdf?Seque) nce=10&isAllowed=y, 04, 1–16. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi

Harahap Repindowaty, R., & Bustanuddin. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD).

Harmi Tjahjanti, P., Sumarmi, W., Widodo, E., Syamharis, R., Annas Zamroni, S., & Indra Prakoso, D. (2018). STRATEGI MEMBANTU WIRAUSAHA DISABILITAS UNTUK MEMBERDAYAKAN EKONOMI SECARA BERKELANJUTAN.

International Labour Organization. (2011). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Https://Www.Ilo.Org/Wcmsp5/Groups/Public/---Asia/---Ro-Bangkok/---Ilo- Jakarta/Documents/Publication/Wcms\_233426.Pdf, 1–4.

Komnasham. (2017). Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia. <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf>

Kusumo Wardani, D., Chadijah, S., & Dwi Widiyanti, S. (2022). ABDI LAKSANA JURNAL PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA JAGABAYA, KECAMATAN WARUNGGUUNUNG, KABUPATEN LEBAK.

Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan. POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 1(2), 98–112. https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.98-112

Nopiah, R., & Islami, A. (2022). PERAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

DIGITAL DIFA CITY TOUR (OJEK DIFA) TERHADAP KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS DI YOGYAKARTA. CONVERGENCE : THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT, 4(1), 1–18.

Nurinayah. (2018). KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 2010-2018.

[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/22325/NASKAH%20](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/22325/NASKAH%20PUBLIKASI) [PUBLIKASI%20](http://repository.umy.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/22325/NASKAH%20PUBLIKASI) TESIS.Pdf?Sequence=12&isAllowed=y.

Pandu Primadata, A., Whardianna, S., & Hidayatul Khusna, I. (2021). PERAN DESA LINGGASARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA PENYANDANG DISABILITAS.

Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif:Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 4(1). https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02

Solikhin, M., & Rahaju, T. (2019). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENYANDANG TUNAGRAHITA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO.

Unesco. (2016). World social science report 2016 : challenging inequalities : pathways to a just world.

Zulfikar, F. (2017). PARTISIPASI KAUM DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSI (STUDI KASUS DESA SIDOREJO DAN DESA BUMIREJO, KECAMATAN LENDAH, KABUPATEN KULONPROGO)

# LAMPIRAN

* 1. **Daftar pertanyaan pada masing-masing stakeholder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Indikator | Pertanyaan |
| 1. | Networked Structure | 1. Bagaimana peran (stakeholder) dalam proses pemberdayaan difabel di panti asuhan Bina Siwi? 2. Apa saja peran dari (stakeholder) dalam proses pemberdayaan difabel di panti asuhan Bina Siwi? |
| 2. | Commitment to a common purpose | 1. Bagaimana partisipasi dari masing- masing (stakeholder) dalam proses kolaborasi ini? Apakah ada keterkaitan satu sama lain? 2. Bagaimana komitmen yang dilakukan oleh masing-masing (stakeholder) |
| 3. | Trust among the participant | a. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya antar (stakeholder) dengan pihak panti asuhan Bina Siwi? |
| 4. | Governance | a. Adakah *Memorandum of Understanding* yang disepakati oleh masing-masing (stakeholder) dengan pihak panti asuhan? |
| 5. | Access to authority | a. Bagaimana otoritas atau aturan-aturan pada masing-masing (stakeholder) |
| 6. | Distributive accountability/responsibility | 1. Bagaimana dengan tanggung jawab masing-masing (stakeholder) dalam proses dan peran di kolaborasi ini? 2. Bagaimana akuntabilitas yang dilakukan pada masing-masing (stakeholder)? |
| 7. | Information sharing | a. Apakah setiap (stakeholder) memiliki sikap keterbukaan dan transparansi hasil kolaborasi? |
| 8. | Access to resources | a. Bagaimana ketersediaan sumber daya secara fisik, finansial dan manusia untuk menunjang proses pemberdayaan  yang diberikan oleh masing-masing (stakeholder)? |